

LAPORAN PENDAHULUAN

BELANJA JASA KONSULTANSI PENELITIAN STRATEGI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN KAWASAN WATERFRONT CITY DI KOTA PONTIANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



2020

CV. IMSCO PUTRA MANDIRI
Jl. P.H.Husin 2, Komplek Puri Akcaya III No. B2 Pontianak 78124
Email : imsco23@yahoo.co.id, Telp. (0561) 711741 - 711702

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Tim penyusun sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang atas segala Rakhmat dan Hidayah Nya sehingga Tim penyusun dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Pendahuluan Jasa Konsultasi Penelitian Strategi Peran Serta Masyarakat Dan Swasta dalam Pengelolaan Kawasan Waterfront City di Kota Pontianak ini terlaksana berkat kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak dengan pihak Konsultan CV. Imsco Putra Mandiri.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan semua pihak yang terlibat sehingga laporan ini dapat diselesaikan pada waktunya, walaupun masih banyak kekurangan, sehingga masih perlu masukan, saran dan pendapat dari semua pihak untuk sempurnanya penulisan laporan ini dan kami harapkan laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pembangunan, khususnya bagi Kota Pontianak serta bagi ilmu pengetahuan pada umumnya.

Pontianak, Oktober 2020

TIM PENYUSUN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud Dan Tujuan	I-4
1.3. Manfaat Dan Sasaran	I-4
1.4. Ruang Lingkup Pekerjaan	I-5
1.5. Metodologi Pekerjaan	I-7
1.6. Keluaran / Output Pekerjaan	I-8
1.7. Jangka Waktu Pekerjaan	I-8
1.8. Sistematika Penulisan Pelaporan	I-8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	II-1
2.1. Pengertian Tepian Air (<i>Waterfront</i>)	II-1
2.2. Prinsip Pembangunan Kawasan Tepi Air.....	II-3
2.3. Struktur Pengembangan	II-6
2.4. Peraturan-Peraturan.....	II-13
2.5. Permasalahan Utama Kawasan Tepian Sungai	II-19
BAB III METODOLOGI	III-1
3.1. Pendekatan Pekerjaan	III-1



3.2. Pengumpulan Data	III-4
3.3. Teknik Analisis.....	III-5
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI	IV-1
4.1. Kondisi Fisik Wilayah Kota Pontianak.....	IV-1
4.2. Kondisi Kawasan Waterfront City Kota Pontianak	IV-15
4.3. Kondisi Pariwisata Kota Pontianak	IV-38
BAB V ORGANISASI DAN RENCANA KERJA	V-1
5.1. Struktur Pelaksana Pekerjaan	V-1
5.2. Tugas Tim dan Tenaga Ahli	V-2
5.3. Pelaporan	V-3
5.4. Rencana Kerja	V-5



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Peta Rencana Struktur Ruang	II-18
Gambar 3.1.	Kerangka Berpikir Pekerjaan	III-14
Gambar 4.1.	Peta Wilayah Administrasi Kota Pontianak	IV-3
Gambar 4.2.	Gerbang Selamat Datang di Kawasan Waterfront City	IV-5
Gambar 4.3.	Peta Deliniasi Kawasan Wilayah Perencanaan	IV-6
Gambar 4.4.	Kawasan Permukiman Kota Baru Pontianak	IV-10
Gambar 4.5.	Kawasan Waterfront City Kota Pontianak	IV-11
Gambar 4.6.	Gambaran Umum Deliniasi Kawasan Permukiman Kota Baru	IV-12
Gambar 4.7.	Gambaran Umum Fungsi Strategis Kota Baru	IV-13
Gambar 4.8.	Tipologi Promenade	IV-14
Gambar 4.9.	Peta Penggunaan Lahan Kawasan Wilayah Perencanaan	IV-24
Gambar 4.10.	Jaringan Jalan pekerasan semen	IV-28
Gambar 4.11.	Jaringan Jalan Peverasan Kayu dan Semen	IV-29
Gambar 4.12.	Kondisi Jaringan Listrik	IV-30
Gambar 4.13.	Kondisi Sumber Air Bersih	IV-30
Gambar 4.14.	Tempat Sampah dan Kondisi Sampah di Kawasan Waterfront City	IV-31
Gambar 4.15.	Kondisi Tranportasi Air di Kawasan Waterfront City	IV-37
Gambar 4.16.	Kondisi Pos Keamanan di Kawasan Waterfront City	IV-38
Gambar 5.1.	Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi menurut Tipologi Klassen	III-8
Tabel 3.2.	Kualifikasi dan Skor Skala Likert	III-12
Tabel 3.3.	Contoh Matriks SWOT	III-13
Tabel 4.1.	Luas Per Kecamatan di Kota Pontianak	IV-2
Tabel 4.2.	Jumlah Penduduk Kota Pontianak Menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Rasio Tahun 2019	IV-7
Tabel 4.3.	Jumlah Penduduk Kota Pontianak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019	IV-8
Tabel 4.4.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²) di Kota Pontianak Tahun 2019	IV-9
Tabel 4.5.	Kondisi Tata Bangunan Kawasan Waterfront City I.....	IV-15
Tabel 4.6.	Kondisi Tata Bangunan Kawasan Waterfront City II.....	IV-21
Tabel 4.7.	Kondisi Pertokoan, Cafe, Warung dan Pedagang Kaki Lima (PKL)	IV-25
Tabel 4.6.	Sarana Peribadatan di Sepanjang Kawasan Waterfront City	IV-32

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Waterfront City adalah konsep pengembangan daerah tepian air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau. Pengertian “waterfront” dalam Bahasa Indonesia secara harafiah adalah daerah tepi laut, bagian kota yang berbatasan dengan air, daerah pelabuhan (Echols, 2003). *Waterfront City/Development* juga dapat diartikan suatu proses dari hasil pembangunan yang memiliki kontak visual dan fisik dengan air dan bagian dari upaya pengembangan wilayah perkotaan yang secara fisik alamnya berada dekat dengan air dimana bentuk pengembangan pembangunan wajah kota yang terjadi berorientasi ke arah perairan.

Pengertian *waterfront* adalah suatu area yang berbatasan dengan air yang memiliki kontak fisik dan visual dengan air laut, sungai, danau dan badan air lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengembangan *waterfront* adalah suatu usaha penataan dan pengembangan bagian atau kawasan kota yang skala kegiatan dan fungsi yang ada sangat beragam dengan intensitas tinggi sebagai kegiatan perkotaan baik untuk fungsi perumahan, pelabuhan dan perdagangan komersial dan industri hingga kawasan wisata. Secara umum *waterfront* berfungsi sebagai tempat dimana komunitas berkumpul untuk mengadakan suatu *event* atau festival, biasanya diadakan pada lapangan terbuka atau berumput dimana semua orang merasa



diterima untuk datang. Semua kawasan yang memiliki batasan antara daerah perairan dengan daratan dapat disebut sebagai kawasan *waterfront*. Dalam konteks yang lebih luas, daerah perairan tersebut meliputi laut maupun sungai yang merupakan wadah aktivitas penduduk sekitarnya. Batasan-batasan yang dipakai dalam menentukan kawasan *waterfront* sangat beragam.

Di dalam pemanfaatan areal alam untuk waterfront mempergunakan pendekatan pelestarian dan pemanfaatan. Kedua pendekatan ini dilaksanakan dengan menitikberatkan pelestarian dibanding pemanfaatan. Kemudian pendekatan lainnya adalah keberpihakan kepada masyarakat setempat agar mampu mempertahankan budaya lokal dan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mengatur *conservation tax* untuk membiayai secara langsung kebutuhan kawasan dan masyarakat lokal.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta agar masyarakat mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, peran serta masyarakat adalah hal penting untuk memastikan pembangunan kepariwisataan berjalan secara berkelanjutan dan masyarakat diharapkan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari aktivitas pariwisata yang terdapat di daerahnya.



Area *waterfront city* juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat terutama jika dilakukan dengan menggunakan sumber daya lokal seperti transportasi, akomodasi dan jasa pemandu. Untuk mencapai pelayanan yang lebih baik, pendapatan pariwisata dapat dialokasikan untuk pengembangan kemampuan masyarakat pengelola dengan meningkatkan jenis usaha atau atraksi budaya yang akan ditampilkan. Selain itu, kegiatan penanaman nilai-nilai menjaga kelestarian lingkungan adalah hal yang tidak boleh terluakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat

Peran serta masyarakat akan timbul karena adanya manfaat langsung dari lingkungan sekitar area, agar dapat memberikan manfaat, maka lingkungan tersebut harus dijaga. Hal tersebut adalah hubungan timbal balik antara kegiatan pariwisata, pengelolaan dan manfaat yang didapatkan dari lingkungan sekitar area waterfront dijaga kelestariannya, maka masyarakat sendiri yang akan menikmati kelestarian tersebut. Begitupun dengan kegiatan penelolan waterfront city, jika kelestarian lingkungan sekitar area dijaga dengan baik, maka masyarakat yang akan mendapatkan keuntungannya secara ekonomi

Peran serta masyarakat di suatu daerah dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain; ketersediaan sumber daya alam yang tidak memadai, Rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga tidak dapat beradaptasi sehingga tidak dapat melihat peluang dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Selain karena faktor tersebut dapat juga disebabkan derajat kesejahteraan yang berbeda dengan layanan public yang kurang mendukung sehingga tidak



mampu memberdayakan diri untuk melakukan kegiatan perekonomian, untuk itu diperlukan Strategi Peran Serta Masyarakat Dan Swasta dalam Pengelolaan Kawasan Waterfront City di Kota Pontianak.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Maksud dari Penelitian ini adalah untuk membuat rencana pengembangan, pengelolaan Peran Serta Masyarakat Dan Swasta dalam Pengelolaan Kawasan *Waterfront City* di Kota Pontianak.

1.2.2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari Penelitian Strategi Peran Serta Masyarakat Dan Swasta dalam Pengelolaan Kawasan 1 di Kota Pontianak adalah untuk Menyusun konsep dan strategi Peran Serta Masyarakat Dan Swasta dalam Pengelolaan Kawasan *Waterfront City* di Kota Pontianak.

1.3. Manfaat dan Sasaran

Adapun manfaat dan sasaran dari Kegiatan Penelitian ini adalah:

- a. Teridentifikasinya model pendekatan partisipasi masyarakat yang sesuai untuk kondisi area setempat
- b. Teridentifikasinya model pelaksanaan pengelolaan *waterfront city* berbasis masyarakat dengan potensi keberhasilan baik.



- c. Untuk mendesain pengelolaan strategi kawasan *waterfront city* yang mencakup perencanaan sarana dan prasarana, pengembangan aktifitas dan fasilitas wisata beserta pengelolaannya.

1.4. Ruang Lingkup Pekerjaan

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Lokasi yang dimaksud adalah Kawasan *Water Front City* yang sudah dibangun oleh Pemerintah yang terletak di tepian sungai Kapuas dari alun-alun Kapuas sampai ke Jembatan Kapuas I, dari Masjid Keraton sampai ke Jembatan Kapuas I dan dan pada tepian sungai Landak dari Masjid Jami Keraton sampai ke dekat surau Hidatushshalihin Kelurahan Tanjung Hilir.

1.4.2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Adapun tahapan pekerjaan tersebut adalah :

- a. Tahapan persiapan

Tahapan ini adalah tahapan untuk mempersiapkan segala sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan antara lain mobilisasi peralatan dan perlengkapan kerja, perancangan jadwal kerja dan koordinasi awal dengan instansi terkait.

- b. Tahapan survey

Survey meliputi pengumpulan data primer maupun sekunder.

Rencana obyek survey antara lain :



1. Survey kondisi fisik Kota Pontianak meliputi : batas wilayah, topografi, kemiringan, hidrologi, landuse dan sebagainya
2. Survey kondisi kependudukan, perkembangan ekonomi dan keadaan sosial budaya penduduk Kota Pontianak
3. Survey kondisi eksisting potensi area *waterfront* yang ada meliputi : jenis, lokasi, luas Kawasan.
4. Survey kondisi sosial ekonomi kawasan waterfront meliputi : jumlah dan proporsi penduduk, mata pencaharian, tingkat perekonomian, pendidikan, agama, adat dan kebiasaan, serta persepsi masyarakat tentang *waterfront*.
5. Dan lain-lain yang mendukung

c. Tahapan analisis

Tahapan ini merupakan tahapan analisis terhadap hasil survey yang sudah dilaksanakan. Analisa tersebut meliputi :

1. Analisa kondisi fisik Kota Pontianak yaitu : topografi, pembangunan lahan, batas wilayah.
2. Analisa kondisi untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan daya beli masyarakat Kota Pontianak terhadap kebutuhan sarana wisata.
3. Analisis kependudukan untuk memperoleh data jumlah, persebaran pertumbuhan dan kepadatan penduduk perwilayah.
4. Analisis *typologi* pekerjaan masyarakat di lokasi setempat.
5. Analisis sosial budaya sebagai pendukung.



6. Analisis Rencana Tata Ruang Kota, sebagai acuan utama dalam perencanaan pembangunan fisik
 7. Analisis kebutuhan perangkat peraturan yang terkait dengan pengembangan *waterfront city*.
- d. Pembuatan rencana
- Hasil analisis digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan. Lingkup perencanaan antara lain:
1. Rencana pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengelolaan *waterfront city*
 2. Rencana kebutuhan sumber daya manusia dan kelembagaan, sebagai dasar dari strategi pengelolaan *waterfront city*
 3. Rencana Pembiayaan.
- e. Tahapan pembuatan Laporan
- Tahapan ini merupakan tahapan pembuatan laporan atas seluruh hasil kegiatan.

1.5. Metodologi Pekerjaan

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dilakukan kepada instansi-instansi pemerintah termasuk di dalamnya adalah Badan Pusat Statistik (BPS).



2. Untuk mempermudah dan memenuhi ketentuan tertib administrasi maka surveyor mengajukan surat izin dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dapat mengeluarkan izin tertulis.
3. Penyedia jasa merumuskan kebutuhan yang akan diperoleh dari masing-masing institusi sekaligus menyediakan *surveyor* yang akan mengambil data dari instansi yang bersangkutan.

1.6. Keluaran / Output Pekerjaan

Keluaran/Output pekerjaan ini adalah tersusunnya Konsep pengelolaan dan Strategi Peran Serta Masyarakat dan Swasta dalam Pengelolaan Kawasan *Waterfront City* di Kota Pontianak.

1.7. Jangka Waktu Pekerjaan

Waktu yang diperlukan untuk pekerjaan/pengadaan jasa konsultasi 2 (dua) bulan berupa laporan hasil studi.

1.8. Sistematika Penulisan Pelaporan

Sistematika penyusunan Laporan Pendahuluan ini meliputi:

BAB I	Bab ini akan membahas pokok-
Pendahuluan	pokok bahasan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metodologi pekerjaan, keluaran/output

pekerjaan, jangka waktu pekerjaan dan sistematika laporan pendahuluan

BAB II
Tinjauan
Teoritis Bab ini akan membahas tinjauan teoritis yang dijadikan acuan untuk melakukan penelitian ini

BAB III
Gambaran
Umum
Lokasi Bab ini akan membahas Gambaran Umum Lokasi yang dijadikan lokasi penelitian

BAB IV
Metodologi
Pekerjaan Bab ini akan membahas metodologi penelitian yang akan dilakukan dan dijadikan panduan dalam melakukan penelitian

BAB V
Organisasi
dan Rencana
Kerja Bab ini akan membahas personil konsultan dengan latar belakang pendidikan serta membahas rencana-rencana kerja yang dihasilkan

BAB II TINJAUAN TEORITIS

2.1. Pengertian Tepian Air (*Waterfront*)

Pengertian waterfront dalam Bahasa Indonesia secara harfiah adalah daerah tepi laut, bagian kota yang berbatasan dengan air, daerah pelabuhan (Echols, 2003).

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Water Front City adalah kawasan di tepian sungai yang berorientasi ke badan perairan dan membentuk karakter koridor sungai, dicirikan dengan orientasi bangunan/bagian muka bangunan yang menghadap ke sungai.

Waterfront adalah pertemuan antara muka air dengan daratan. Dalam hal ini, muka air tersebut dapat berupa lautan, danau, dan sungai. *Waterfront* juga dipahami sebagai bagian dari suatu area hunian atau kota yang berbatasan dengan air, khususnya daerah dermaga dimana kapal-kapal berlabuh (*Dictionary of the English Language*, 2000). *Waterfront* juga berarti area dari suatu kota (seperti pelabuhan atau galangan kapal) sepanjang wilayah perairan kota (thefreedictionary.com, 2005). Menurut Breen dan Rigby (1994) fenomena perkembangan *waterfront* dimulai tahun 1960 dan memuncak tahun 1970an sampai dengan 1980 an. Faktor pemicu perkembangan *waterfront* dimulai dengan adanya kesadaran akan lingkungan air yang bersih dan secara global sangat berguna untuk menambah daya tarik kota sebagai aset wisata yang bisa menambah pendapatan.

Beberapa pengertian lain tentang pengertian Waterfront yang diambil dari beberapa pakar yang kompeten dibidangnya, antara lain:

- Waterfront memiliki arti muka pantai (Kamus Lengkap Teknik Inggris-Indonesia). Wilayah waterfront terdiri dari air dan tanah yang sesungguhnya menawarkan dan menciptakan suatu lingkungan yang unik dan lestari.
- Waterfront merupakan suatu kawasan pertemuan antara darat dan lautan, akan tetapi yang menjadi perhatian disini ialah daerah tempat aktivitas manusia yang berhubungan dengan lingkungan darat dan laut.
- Waterfront merupakan bagian dari upaya pengembangan wilayah perkotaan yang secara fisik alamnya berada dekat dengan air, baik berupa darat laut, sungai, maupun danau dan dimanfaatkan secara optimal.
- Waterfront merupakan salah satu tempat dimuka bumi dan merupakan batas dua keadaan air dan daratan. Waterfront diartikan sebagai lahan atau area yang terletak berbatasan dengan air, terutama merupakan bagian kota yang menghadap ke laut, sungai, danau dan sejenisnya yang dikembangkan dengan sistem tertentu dengan bangunan memanfaatkan *view* laut.

Waterfront Development adalah konsep pengembangan daerah tepian air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau. Pengertian "waterfront" dalam Bahasa Indonesia secara harafiah adalah daerah tepi laut, bagian kota yang berbatasan dengan air, daerah pelabuhan. Sedangkan, urban waterfront mempunyai arti suatu lingkungan perkotaan yang berada di tepi atau dekat wilayah perairan, misalnya lokasi di area pelabuhan besar di kota metropolitan (Wrenn, 1983).

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa waterfront atau kawasan tepi air adalah suatu daerah atau area yang terletak di dekat/berbatasan dengan kawasan perairan dimana terdapat satu atau beberapa kegiatan dan aktivitas pada area pertemuan tersebut. Waterfront ialah suatu lahan atau area yang terletak berbatasan dengan air, terutama merupakan bagian kota yang menghadap ke sungai dan sejenisnya yang dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya pengembangan wilayah perkotaan, dimana yang menjadi pokok perhatian disini ialah daerah tempat aktivitas manusia yang berhubungan dengan lingkungan darat dan air yang sesungguhnya menawarkan dan menciptakan suatu lingkungan yang unik dan lestari.

2.2. Prinsip Pembangunan Kawasan Tepi Air

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan didalam pembangunan kawasan tepian air adalah:

- Komponen visual bangunan direncanakan harus sedapat mungkin memanfaatkan view pantai, sungai, danau dengan teknik dan strategi pemanfaatan tertentu sehingga tidak terkesan saling berlomba bahkan cenderung menutup view.
- Komponen fungsional, pembangunan kawasan *Waterfront* sebaiknya mengangkat dan meningkatkan fungsi-fungsi aktivitas yang telah ada dan berkembang sebelumnya tanpa melakukan perubahan yang drastic dan tanpa dasar yang jelas.
- Komponen lingkungan, pembangunan kawasan *Waterfront* haruslah tidak merusak lingkungan alam yang ada sehingga tema keselarasan dengan lingkungan dapat di tampilkan.

- Untuk mencapai kesuksesan dalam pembangunan tepian air dipengaruhi oleh : tema, citra, keorisinilan, fungsi, kebutuhan masyarakat, kelayakan keuangan, persetujuan lingkungan (*enviromtent*), teknologi kontruksi, keefektifan manajemen, dan perencanaan proyek (L. Azeo Torre,1989).

Fungsi *Waterfront*

Kawasan tepi air memang memiliki arti dan pengertian yang cukup luas tergantung dari kondisi kawasan tersebut. Hasil penelitian dari berbagai lokasi di Indonesia menunjukkan fungsi tepian air adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan komersial (perdagangan)
- b. Kawasan budaya pendidikan dan lingkungan hidup
- c. Kawasan peninggalan bersejarah
- d. Kawasan pemukiman
- e. Kawasan wisata (rekreasi)
- f. Kawasan pelabuhan dan transportasi
- g. Kawasan pertahanan dan keamanan

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan

Kawasan Tepian Air

Didalam pengembangan kawasan tepian air terdapat beberapa faktor – faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan kawasan ini. Faktor – faktor tersebut adalah :

- Iklim, arah angin, arah arus, banjir, topografi, geologi, fisiografi, hidrologi, struktur tanah, vegetasi landscape dan lain – lain.
- Melestarikan lingkungan yang ada tanpa mengubah alam, kecuali menambah kualitas visual, sedapat mungkin tidak menambah

kontur, namun pembangunannya mengikuti kontur alam yang ada kecuali diperlukan untuk penyesuaian drianse.

- Pengurangan sungai tidak dianjurkan karena dapat mengurangi daya tampung air sehingga air akan menggenangi jalan dan meningkatkan aliran permukaan.
- Reklamasi sungai tidak dianjurkan karena akan mengurangi kemiringan atau kelandaian seluruh jaringan saluran kawasan sehingga aliran air terhambat, sedimentasi dan akhirnya menimbulkan banjir.

Tipikal Kawasan Tepian air

Berdasarkan pada pengalokasian struktur ruang, kawasan tepian air dibagi dalam 3 sub kawasan yaitu :

1. Sub kawasan pengembangan fasilitas primer, yaitu suatu alokasi penggunaan ruang dengan konsentrasi kegiatan tinggi. Pada umumnya sub kawasan ini mengarah pada alokasi komersial dan wisata serta bisnis.
2. Sub kawasan pengembangan fasilitas sekunder, yaitu suatu alokasi penggunaan ruang yang ditujukan untuk mencukupi kawasan sekitarnya, fasilitas yang dikembangkan adalah penyediaan ruang untuk kebutuhan primer.
3. Sub kawasan non fasilitas, merupakan kawasan dengan penggunaan campuran (permukiman, wisata dan industri).

Pembangunan tepi air terdiri dari 3 jenis yaitu :

1. Konservasi, yaitu penggunaan kawasan tepi air pada kawasan lama.
Hal ini dimungkinkan dengan adanya keberlanjutan fungsi lama.

2. *Redevelopment*, yaitu mengubah peruntukan yang ada dengan fasilitas dan kapasitas yang berbeda.
3. *Development* (pembangunan baru), pembangunan jenis ini biasanya muncul karena kebutuhan akan perkembangan kota.

2.3. Struktur Pengembangan

Struktur peruntukan kawasan kota pantai dapat diarahkan pada 7 (tujuh) pengembangan, yaitu :

A. Kawasan Komersial (*Commercial Waterfront*) :

Adapun kriteria pokok pengembangan kawasan komersial di kota pantai adalah :

- a. Harus mampu menarik pengunjung yang akan memanfaatkan potensi kawasan pantai sebagai tempat bekerja, belanja maupun rekreasi (wisata);
- b. Kegiatan diciptakan tetap menarik dan nyaman untuk dikunjungi (dinamis);
- c. Bangunan harus mencirikan keunikan budaya setempat dan merupakan sarana bersosialisasi dan berusaha (komersial);
- d. Mempertahankan keberadaan golongan ekonomi lemah melalui pemberian subsidi.
- e. Keindahan bentuk fisik (profil tepi pantai) kawasan pantai diangkat sebagai faktor penarik bagi kegiatan ekonomi, sosial-budaya, dll.

B. Kawasan Budaya, Pendidikan dan Lingkungan Hidup (*Cultural, Education, dan Environmental Waterfront*) :

Kriteria pokok pengembangannya adalah :



- a. Memanfaatkan potensi alam sungai untuk kegiatan penelitian, budaya dan konservasi;
- b. Menekankan pada kebersihan badan air dan suplai air bersih yang tidak hanya untuk kepentingan kesehatan saja tetapi juga untuk menarik investor;
- b. Diarahkan untuk menyadarkan dan mendidik masyarakat tentang kekayaan alam tepi pantai yang perlu dilestarikan dan diteliti.
- c. Keberadaan budaya masyarakat harus dilestarikan dan dipadukan dengan pengelolaan lingkungan didukung kesadaran melindungi/mempertahankan keutuhan fisik badan air untuk dinikmati dan dijadikan sebagai wahana pendidikan (keberadaan keragaman biota laut, profil pantai, dasar laut, mangrove, dll).
- d. Perlu ditunjang oleh program-program pemanfaatan ruang kawasan, seperti penyediaan sarana untuk upacara ritual keagamaan, sarana pusat-pusat penelitian yang berhubungan dengan spesifikasi kawasan tersebut, dll.
- e. Perlu upaya pengaturan/pengendalian fungsi dan kemanfaatan air/badan air.

C. Kawasan Peninggalan Bersejarah (Historical/Heritage Waterfront) :

Kriteria pokok pengembangannya adalah :

- a. Pelestarian peninggalan-peninggalan bersejarah (landscape, situs, bangunan dll) dan/atau merehabilitasinya untuk penggunaan berbeda (modern);
- b. Pengendalian pengembangan baru yang kontradiktif dengan pembangunan yang sudah ada guna mempertahankan karakter (ciri) kota;

- c. Program-program pemanfaatan ruang kawasan ini dapat berupa pengamanan pantai dengan pemecah gelombang untuk mencegah terjadinya abrasi (melindungi bangunan bersejarah di tepi sungai), pembangunan tanggul, polder dan pompanisasi untuk menghindari terjadinya genangan pada bangunan bersejarah, dll.

D. Kawasan Wisata/Rekreasi (Recreational Waterfront) :

Kriteria pokok pengembangan kawasan rekreasi/wisata di kota pantai adalah :

- a. Memanfaatkan kondisi fisik sungai untuk kegiatan rekreasi (indoor atau outdoor);
- b. Pembangunan diarahkan di sepanjang badan air dengan tetap mempertahankan keberadaan ruang terbuka;
- b. Perbedaan budaya dan geografi diarahkan untuk menunjang kegiatan pariwisata, terutama pariwisata perairan;
- c. Kekhasan arsitektur lokal dapat dimanfaatkan secara komersial guna menarik pengunjung.
- d. Pemanfaatan kondisi fisik pantai untuk kegiatan rekreasi.

E. Kawasan Permukiman (Residential Waterfront) :

Kriteria pokok pengembangan kawasan permukiman di tepi sungai adalah :

- a. Perlu keselarasan pembangunan untuk kepentingan pribadi (privat) dan umum;
- b. Perlu memperhatikan tata air, budaya lokal serta kepentingan umum.
- c. Pengembangan kawasan permukiman dapat dibedakan atas kawasan permukiman penduduk asli dan kawasan permukiman baru.

- d. Pada permukiman/perumahan harus dilakukan upaya penataan dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kawasan. Penempatan perumahan nelayan baru hendaknya disesuaikan dengan potensi sumber daya sekitar dan "market" hasil budidaya perikanan.
- e. Program pemanfaatan kawasan yang dapat diterapkan untuk kawasan permukiman penduduk asli (lama) antara lain: revitalisasi/penataan bangunan, penyediaan utilitas,
- f. penanganan sarana air bersih, air limbah dan persampahan, serta pemeliharaan drainase.
- g. Program pemanfaatan kawasan yang dapat diterapkan untuk kawasan permukiman baru antara lain : penataan bangunan dengan memberi ruang untuk public access ke badan air, pengaturan pengambilan air tanah, reklamasi, pengaturan batas sempadan dari badan air, program penghijauan sempadan, dll.

F. Kawasan Pelabuhan dan Transportasi (Working and Transportation Waterfront) :

Kriteria pokok pengembangannya adalah :

- a. Pemanfaatan potensi pantai untuk kegiatan transportasi, pergudangan dan industri;
- b. Pengembangan kawasan diutamakan untuk menunjang program ekonomi kota dengan memanfaatkan kemudahan transportasi air dan darat;
- b. Pembangunan kegiatan industri harus tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hidup;

- c. Program pemanfaatan ruang yang dapat diterapkan : pembangunan dermaga, sarana penunjang pelabuhan (pergudangan), pengadaan fasilitas transportasi, dll.

G. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (Defence Waterfront) :

Kriteria pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di tepi sungai :

- a. Dipersiapkan khusus untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
- b. Perlu dikendalikan untuk alasan hankam dengan dasar peraturan khusus;
- c. Pengaturan tata guna lahan (land-use) untuk kebutuhan dan misi hankam.

Pengolahan dan pengelolaan kawasan Tepi Air (Waterfront)

Pengolahan kawasan Tepi Air (Waterfront) dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut:

- Sebagai kawasan property atau housing dan sebagai pusat kota atau Central Business Distric (CBD) atau *down town*. Dalam pembangunan kedua komponen diatas unsur keindahan/estetika yang paling memegang peran utama.
- Pengolahan dan pengelolaan daerah tepi air (Waterfront) harus dilakukan secara profesional, seperti mengelola fasilitas-fasilitas yang ada, membuat promosi agar menarik pengunjung, sampai melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga/instansi terkait lainnya baik dari pihak pemerintah maupun swasta , terutama bagi daerah yang baru dikembangkan.
- Pengolahan dan pengelolaan dengan sistem kerjasama pembangunan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sehingga pembangunan

kawasan memenuhi kebutuhan serta agar pembangunan kawasan tetap berkelanjutan.

Strategi penataan dan pengolahan ruang kawasan Waterfront dapat diuraikan sebagai berikut:

- Penataan ruang yang mampu mengatasi problem pembangunan kawasan serta meningkatkan taraf kehidupan penduduk setempat, dalam arti penataan ruang tersebut harus memikirkan warganya sehingga dapat meningkatkan kemampuan menuju kondisi sosial ekonomi yang lebih baik.
- Penataan ruang yang dapat memberikan peran serta kepada pihak swasta atau Lembaga swadaya masyarakat yang ingin melaksanakan atau menanam modalnya pada Kawasan tersebut, namun tidak merugikan masyarakat/aktivitas setempat yang telah ada sebelumnya.
- Penataan ruang yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang menyeluruh, pendekatan dilakukan melalui tahap perumusan kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan, tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaannya.
- Penataan ruang yang bersifat dinamis serta dapat diuji kemanfaatannya dan ketepatangunaanya berdasarkan criteria cepat tanggap, terbuka dan dapat diterima oleh masyarakat setempat serta kesinambungan.

Strategi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dan pengolahan kawasan waterfront adalah sebagai berikut:

- Menciptakan keterkaitan tata air, tata hijau, tata ruang, dan tata peruntukan lahan dalam skala tata kota terpadu.

- Menciptakan elemen-elemen peneduh dalam skala kawasan melalui perancangan jalur-jalur pedestrian yang dipayungi dengan elemen-elemen peneduh berupa pergola, perancangan landscape perairan dan vegetasi pada ruang-ruang terbuka, perancangan material permukaan jalan yang dapat meresapkan air.
- Menciptakan elemen-elemen peneduh dengan system beranda dalam skala bangunan berupa atrium, selasar, balkon, plaza, taman, dan penyelesaian dinding serta cekungan.
- Merancang bangunan yang mengoptimalkan pemakaian penghawaan alami serta menghindarkan terjadinya radiasi panas yang tersimpan dalam dinding bangunan.
- Mengendalikan tata aliran udara dari dan menuju kawasan perkotaan melalui penataan koridor-koridor dan kantong-kantong ruang terbuka bagi sirkulasi angin untuk menghindari terjadinya heat island pada kawasan sumber terjadinya peningkatan suhu.
- Menciptakan jaringan ruang terbuka dan vegetasi dalam skala kawasan kota.

Pengembangan kawasan Waterfront memiliki beberapa permasalahan umum yang sering dihadapi. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Masalah Perundangan dan Peraturan
Perundangan dan peraturan yang berkaitan dengan kawasan tepian air di Indonesia melibatkan berbagai instansi dan tingkat kepentingan yang berbeda. Kadangkala antara peraturan dan perundangan ini saling tumpang tindih. Implikasinya adalah pada tataran kewenangan dan tanggung jawab penanganan yang kurang jelas.

- **Masalah Peruntukan Ruang dan Bangunan**
Penetapan penggunaan ruang dan bangunan di kawasan tepian air masih diperdebatkan hingga saat ini. Ada pendapat bahwa peruntukan ruang dan bangunan di kawasan tepi air hanya untuk fungsi tertentu berdasarkan karakteristik khas kawasan tepian air, misalnya untuk fungsi-fungsi lindung dan penghijauan atau fungsi-fungsi yang hanya ada kaitannya dengan air. Disisi lain berpendapat, penggunaan ruang dan bangunan diserahkan saja pada kesesuaian lahan dan permintaan pasar. Pendapat lainnya, didasarkan pada keterbatasan lahan-lahan kawasan tepi air, sehingga harus dinikmati dan digunakan oleh siapa saja.
- **Masalah Kepadatan, Estetika, dan Keselamatan Bangunan**
Ketiga masalah ini saling berkaitan dan paling sering dijumpai pada hampir sebagian besar kawasan tepian air di Indonesia. Dimasa lalu kawasan ini merupakan Kawasan “belakang” yang kurang diperhatikan dan kurang terjamah oleh perencanaan. Kepadatan bangunan dikawasan tepian air, selain berdampak pada masalah lingkungan, juga pada masalah estetika dan masalah keselamatan bangunan dan penghuninya.

2.4. Peraturan-Peraturan

2.4.1 Undang-undang No.26 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 merupakan peraturan perundangan yang menjelaskan tentang Penataan ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

1. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.
3. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
4. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
5. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
- b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisiekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:

- a. rencana umum tata ruang, terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.
- b. rencana rinci tata ruang, terdiri atas :
 - rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 - rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Rencana detail tata ruang dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi. Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. Rencana pola ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

2.4.2 Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 tentang Rencana tata ruang



wilayah kota Pontianak untuk 2013-2033, menunjukkan perkembangan utama sebagai berikut:

- Menghubungkan tiga zona kota yang dipisahkan oleh Sungai Kapuas dengan membangun jalan lingkar dan jembatan penyeberangan;
- Menentukan batas sungai dan area gambut di pinggiran kota sebagai ruang terbuka hijau;
- Menetapkan area budidaya berdasarkan keterkaitan fungsional dan pertimbangan efektivitas pergerakan barang dan manusia;
- Area pusat direncanakan untuk kegiatan perdagangan, layanan, dan perumahan dengan kepadatan tinggi dan bangunan bertingkat tinggi;
- Area pusat kota direncanakan untuk fasilitas perumahan dan perkotaan dengan kepadatan sedang dan tinggi bangunan sedang;
- Pinggiran kota direncanakan untuk perumahan dan fasilitas perkotaan dengan perumahan kepadatan rendah dan alokasi area pertanian dan konservasi alam;
- Ruang terbuka hijau dan taman tersebar di seluruh bagian kota dengan memperhatikan pertimbangan ekologis dan estetika.

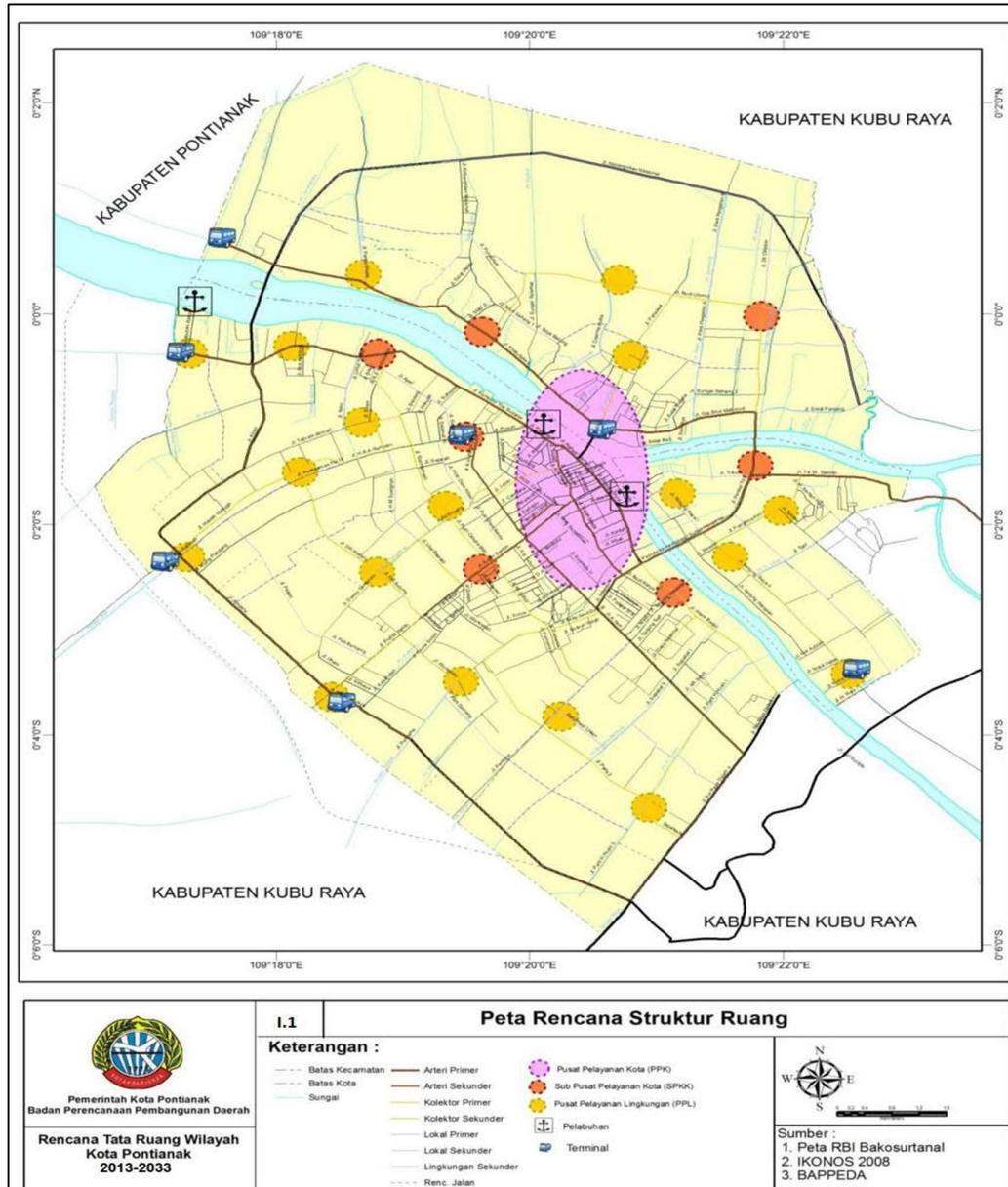
Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. meliputi:

- a. mengalokasikan ruang untuk kegiatan industri produk lokal untuk
- b. mendorong penguatan ekonomi kreatif;
- c. menetapkan situs budaya dan bersejarah sebagai cagar budaya yang



- d. dapat dikembangkan menjadi objek wisata;
- e. mengembangkan kemitraan dan kawasan wisata dan budaya yang menjadi salah satu daya tarik kota;
- f. mengembangkan kegiatan pariwisata, rekreasi dan perlindungan alam
- g. di kawasan pinggiran dan badan Sungai Kapuas dengan konsep
- h. waterfront city;
- i. mengembangkan kawasan sentra agribisnis; dan
- j. memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Gambar 2.1. Peta Rencana Struktur Ruang



Sumber: RTRW Kota Pontianak 2013 - 2033

Dalam konsep penataan ruang Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah dikembangkan pembangunan pusat kota yang diperluas ke arah Utara dan Timur dari pusat kota yang ada sekarang ini, sehingga nantinya

pusat kota mencakup semua wilayah kecamatan. Di mana semua kecamatan memiliki akses yang merata ke pusat kota. Pada kawasan pusat kota ini akan dijadikan cikal bakal pengembangan lebih lanjut dari konsep *Water Front City* (WFC), yaitu di masa mendatang diharapkan pengembangan WFC semakin melebar dari kawasan pusat kota ke arah barat maupun timur. Kawasan WFC ditetapkan sebagai satu kesatuan penataan terdiri dari pusat-pusat kegiatan yang bervariasi dengan lokasi menyebar di sepanjang Sungai Kapuas dan Sungai Landak.

2.5. Permasalahan Utama Kawasan Tepian Sungai

1. Pencemaran lingkungan

Pencemaran lingkungan merupakan masalah yang selalu ada pada setiap kegiatan manusia, sama halnya pada *waterfront*, pencemaran lingkungan juga menjadi salah satu masalah pokok. Pencemaran lingkungan seperti polusi pada air, udara maupun tanah merupakan yang paling utama yang harus dicari solusinya. Pencemaran lingkungan tidak hanya timbul dari limbah rumah tangga, namun juga perusaha-perusahaan besar (garmen, bengkel) yang membuang limbah secara sembarangan di air. Kadang kala limbah yang dibuang tidak diproses terlebih dahulu sebelum dibuang. Sehingga lebih cepat berdampak kepada pencemaran lingkungan.

2. Peningkatan jumlah penduduk

Bantaran sungai merupakan daerah yang produktif. Maka tidak salah jika banyak orang yang datang untuk bermukim disana, tentunya jumlah penduduk yang datang tidak dapat dikontrol dengan tepat. Semakin banyak atau semakin besar daerah *waterfront* tersebut,

semakin membuat banyak penduduk yang datang untuk bermukim. Tentu saja semakin lama maka akan menyebabkan tingkat kepadatan penduduk yang menyebabkan kebutuhan akan lahan bertempat tinggal semakin banyak.

3. Aksesibilitas publik

Akses umum seperti sekolah, rumah sakit maupun jalan besar untuk publik sulit diakses karena area tersebut lebih banyak digunakan untuk areal permukiman sehingga tidak ada fasilitas-fasilitas penunjang dalam kesehatan dan pendidikan.

Permasalahan utama kawasan bantaran sungai dapat dibagi atas 7 (tujuh) kategori :

1. Permasalahan Fisik Lingkungan

- a. Adanya sedimentasi sehingga garis sungai sering berubah, yang mengganggu aktivitas yang sedang maupun akan berlangsung. Sedimentasi mengakibatkan pendangkalan sehingga aliran air terganggu.
- b. Muka air tanah tinggi dan merupakan fungsi retensi menyebabkan sering terjadi genangan banjir, *run-off* rendah, lingkungan korosif, serta tingginya intrusi air laut ke air tanah.
- c. Tata guna lahan dan pembangunan fisik yang tidak sesuai karakteristik bantaran sungai akibat adanya kompetisi lokasi yang berhadapan dengan air. Hal ini mengakibatkan konflik kepentingan antara kawasan konservasi dan komersial.

- d. Dilihat dari kondisi klimatologinya, kawasan tersebut mempunyai dinamika iklim, cuaca, angin, dan suhu, serta mempunyai kelembaban tinggi.
- e. Pergeseran fungsi tepi sungai mengakibatkan timbulnya :
 - Gejala erosi tanah yang terus meningkat sehingga terjadi pedangkalan sungai.
 - Jumlah air permukaan menuju badan air naik, sehingga timbul banjir.
 - Pertentangan kepentingan.
 - Meningkatnya pencemaran air berakibat pada penurunan hasil perikanan.
 - Potensi sungai sebagai objek wisata sukar dimanfaatkan karena kecenderungan menurunnya estetika lingkungan.
 - Potensi sungai sebagai sumber air bersih penduduk menjadi tidak ekonomis lagi karena membutuhkan biaya tinggi untuk proses penjernihannya.

2. Permasalahan Flora dan Fauna

Permasalahan flora dan fauna adalah terancamnya keberadaan flora dan fauna spesifik akibat meningkatnya aktivitas perkotaan yang tidak berwawasan lingkungan.

3. Permasalahan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- a. Pengembangan kawasan sering mengabaikan keberadaan penduduk setempat sehingga sering muncul konflik kepentingan antara kepentingan sosial dan komersial.

- b. Untuk kawasan yang mempunyai nilai budaya dan peninggalan sejarah, sering terjadi konflik/friksi kepentingan antara kepentingan konservasi dan pengembangan kawasan.
- c. Mayoritas penduduk golongan ekonomi lemah dengan latar belakang pendidikan relative terbatas dan pengetahuan akan lingkungan sehat, serasi, teratur dan berkelanjutan cenderung masih kurang dan terjadi kebiasaan '*tidak sadar lingkungan*' dan cenderung kurang memperhatikan bahaya dan resiko.

4. Permasalahan Perumahan dan Permukiman

- a. Sebagian besar perumahan nelayan dan perumahan di atas air belum memenuhi standar persyaratan kesehatan, kenyamanan, keamanan, ketertiban, keindahan dan berwawasan lingkungan.
- b. Kondisi lingkungan sungai kurang mendukung, sehingga perlu penyelesaian sistem struktur tepat guna pada kondisi sungai,
- c. Kecenderungan pengembangan kawasan permukiman, terutama di atas air akan bersaing dengan lajunya pengembangan wilayah komersial.
- d. Belum adanya pengaturan perencanaan, pelaksanaan, juga pengawasan dan pemeliharaan kawasan perumahan di pantai, terutama perumahan di atas air.
- e. Belum maksimalnya teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan ini, baik dari aspek fisik bangunan, maupun teknologi sistem pendukungnya. Alternatif-alternatif teknologi yang dapat diterapkan umumnya relatif modern dan cenderung memakan biaya tidak murah, sehingga menjadi tidak efektif, mengingat daya jangkau relatif terbatas. Perlu beberapa teknologi murah dan tepat guna;

- f. Tidak didukung penyediaan material berkualitas yang cukup (jumlah semakin terbatas dan relatif semakin mahal);

5. Permasalahan Prasarana dan Sarana Lingkungan

- a. Drainase kawasan sulit menggunakan sistem gravitasi, karena merupakan kawasan datar. Penanganan drainase tersebut dipengaruhi oleh kondisi *hinterland* kawasan, curah hujan, tingkat *run-off*, dan pasang-surut air laut. Upaya yang diperlukan antara lain memperlancar aliran air melalui pompanisasi, sistem polder, pengurugan dsb.
- b. Pembuangan air limbah yang bermuara di sungai, mengakibatkan badan air terkontaminasi. Pengaturan perlu mempertimbangkan pengendalian pencemaran air (PP No. 20/1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, Permen 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air Pada Sumber-Sumber Air).
- c. Penyediaan air bersih dengan memanfaatkan sumber air setempat biasanya payau dan mempunyai salinitas tinggi, tidak layak dikonsumsi. Perlu upaya penyediaan air bersih yang tidak mengganggu keseimbangan sumber air baik kualitas maupun kuantitasnya (PP No. 22/1982 tentang Tata Pengaturan Air, Permen PU No 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Ijin Penggunaan Air dan atau Sumber Air). Pada kawasan di atas air yang telah terlayani jaringan air bersih/minum kota pada umumnya mempunyai permasalahan pada sering terjadinya kerusakan jaringan perpipaan sebagai akibat perilaku hempasan ombak dan korosi.
- d. Terbatasnya ruang bagi lokasi TPA dalam penanganan sampah akan berakibat

terbatasnya ruang pembuangan alamiah, yang akan menyebabkan polusi air tanah.

- e. Prasarana jalan lingkungan, perlu mendapat perhatian serius.
 - Pola dan jaringan jalan yang tidak teratur (organik);
 - Persyaratan konstruksi jalan yang relatif tidak memenuhi syarat;
 - Penerangan jalan, terutama di malam hari nyaris tidak ada sama sekali;
- f. Prasarana (peralatan dan mekanisme) penanggulangan bahaya, baik kebakaran maupun bencana alam tidak ada sama sekali.
- g. Keberadaan perumahan kebanyakan menghalangi 'public domain'

6. Permasalahan Pengelolaan Kawasan

- a. Otorisasi pengelolaan kawasan menyebabkan terjadinya eksklusivisme yang mengakibatkan adanya konflik antara kegiatan komersial dan sosial.
- b. Otorisasi kegiatan khusus mempunyai potensi terjadinya konflik pemanfaatan ruang dengan kawasan sekitarnya.

7. Permasalahan Status Hukum (Legalitas) Kawasan

- a. Meskipun eksistensi fisik diakui, namun pengakuan dan dukungan secara hukum masih terkesan ragu-ragu, yang mungkin disebabkan oleh beberapa faktor:
 - Pengertian sempadan pantai masuk dalam kelompok kawasan lindung, sebagaimana tercantum dalam UU No.24/1992 (penjelasan pasal 7 ayat 1).
 - Pengertian permukiman : bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perdesaan maupun perkotaan yang

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (Sumber : UU No.4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman).

- o Pengertian persyaratan pembakuan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan dan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau hunian untuk membangun, hanya dapat terwujud di atas sebidang tanah yang disebut kavling tanah matang (interpretasi UU No.4/1992 Bab I - pasal 1).
- b. Karena kawasan di atas air tumbuh tanpa aturan yang jelas dengan sendirinya status hukumnya menjadi tidak jelas.
- c. Belum memungkinkan menjadikan bangunan/sarana dan prasarana sebagai jaminan/ agunan kredit, khususnya pada lembaga-lembaga keuangan/perbankan yang ada;

BAB III METODOLOGI

4.1. Pendekatan Pekerjaan

Pendekatan yang dilakukan ini disusun berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, yaitu Pekerjaan dilaksanakan melalui pendekatan survey, kemudian hasil survey akan dilakukan analisis sebagai bahan pembuatan perencanaan). Secara garis besar ada tiga kegiatan yang akan dilakukan yaitu pengumpulan data kajian kepustakaan dan analisis data. Dalam menangani pekerjaan ini, konsultan akan melakukan dua pendekatan pekerjaan, yaitu :

4.1.1 Pendekatan Umum

1. Pekerjaan Persiapan, diantaranya:
 - a. Persiapan Personil; yakni mempersiapkan seluruh tenaga ahli dan tenaga pendukung untuk segera memulai melaksanakan tugasnya (mobilisasi) sesuai dengan tata laksana personil (man-month) yang telah ditentukan.
 - b. Persiapan Administrasi, meliputi:
 - Melakukan pengurusan SPK (Surat Perintah Kerja).
 - Surat Rekomendasi/Pengantar dari Direksi untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan tata kerja pelaksanaan kegiatan.
 - Persiapan peralatan/fasilitas penunjang, yaitu mulai mengadakan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini.

c. Pengorganisasian

Agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai target yang diinginkan, maka konsultan akan menyusun struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan yang mencerminkan:

- Tugas dan Tanggungjawab;
- Sistem Koordinasi;
- Keterlibatan, maupun;
- Jalur Komunikasi dan lain-lain.

Konsultan akan mempersiapkan dan melakukan koordinasi pekerjaan dengan personil ahli yang telah ditugaskan agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kerangka kerja dan urutan pekerjaan dibahas bersama, sehingga diharapkan semua tenaga ahli mengerti dan memahami tugasnya masing-masing. Koordinasi pekerjaan ini akan dilakukan juga dengan direksi pekerjaan, agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan tujuan serta selesai sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

d. Penempatan Tenaga Ahli

Konsultan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menugaskan tenaga ahli yang cukup berpengalaman sesuai dengan bidang disiplin ilmu masing-masing untuk melaksanakan, mengkoordinir dan menganalisa sesuai aktivitas pekerjaan agar diperoleh standar kualitas yang diharapkan.

4.1.2 Pendekatan Teknis

Dalam menangani pekerjaan ini disusun suatu pendekatan teknis berupa strategi yang dirinci melalui tahap-tahap pekerjaan, sehingga setiap langkah

pekerjaan dapat selalu dievaluasi serta dapat diantisipasi terhadap kendala yang mungkin timbul.

Adapun pendekatan yang akan dilaksanakan dalam pendekatan teknis, meliputi:

- a. Melakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan pekerjaan selanjutnya, dimana pada tahap ini koordinasi internal pelaksana dan koordinasi dengan tim teknis proyek perlu dilakukan secara sinergis agar diperoleh kesatuan pemahaman tentang tahapan pelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan seterusnya;
- b. Menyusun konsep awal DAN strategi Peran Serta Masyarakat Dan Swasta dalam Pengelolaan Kawasan Waterfront City di Kota Pontianak.
- c. Melakukan pengumpulan data-data baik data sekunder (studi literatur) terhadap data yang telah ada dan data primer (survey);
- d. Menyusun laporan antara sebagai bentuk dari laporan kemajuan pekerjaan setelah pengumpulan data dilakukan;
- e. Melakukan kajian dan analisis dari data-data yang ada serta selanjutnya mengelompokkan data-data tersebut kedalam kumpulan data sesuai dengan sasaran yang telah dibahas pada bab 1 (satu);
- f. Menentukan urutan prioritas data dan informasi yang akan ditampilkan kedalam materi pekerjaan;
- g. Menyusun laporan akhir sementara atau laporan final yang merupakan rancangan awal dalam membuat rekomendasi atas Penyusunan konsep dan strategi Peran Serta Masyarakat Dan Swasta dalam Pengelolaan Kawasan Waterfront City di Kota Pontianak. Mengadakan diskusi untuk membahas laporan akhir sementara (laporan akhir) hasil pekerjaan dan melakukan penyempurnaan hasil produk bila dikehendaki oleh tim teknis/stakeholder.

- h. Setelah dibahas, kemudian disusun laporan akhir pekerjaan yang memuat data dan analisis serta rekomendasi mengenai konsep dan strategi Peran Serta Masyarakat Dan Swasta dalam Pengelolaan Kawasan Waterfront City di Kota Pontianak yang dipersyaratkan dalam TOR/KAK.

4.2. Pengumpulan Data

Untuk keperluan Penelitian Strategi Peran Serta Masyarakat Dan Swasta dalam Pengelolaan Kawasan Waterfront City di Kota Pontianak harus dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder.

4.2.1 Pengumpulan Data Primer

Data primer diperoleh dari survei yang dilakukan di Kawasan Water Front City yang sudah dibangun oleh Pemerintah yang terletak di tepian sungai Kapuas dari alun-alun Kapuas sampai ke Jembatan Kapuas I, dari Masjid Keraton sampai ke Jembatan Kapuas I dan dan pada tepian sungai Landak dari Masjid Jami Keraton sampai ke dekat surau Hidatushshalihin Kelurahan Tanjung Hilir. Sehingga menghasilkan data-data masukan (*input*) proses Menyusun konsep dan strategi Peran Serta Masyarakat Dan Swasta dalam Pengelolaan Kawasan Waterfront City di Kota Pontianak. Proses memperoleh data primer dipersiapkan, diorganisasikan, dan dilaksanakan oleh sebuah tim survei.

Pengumpulan data primer meliputi:

- 1) Penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui wawancara kepada masyarakat setempat, pihak swasta dan pihak pemerintahan setempat;

- 2) Pengenalan kondisi fisik dan sosial budaya di wilayah penelitian secara langsung melalui kunjungan ke wilayah studi yang akan dibahas.

Data yang dihimpun dalam pengumpulan data, meliputi;

- 1) Data wilayah administrasi;
- 2) Data topografi;
- 3) Data kemiringan
- 4) Data hidrologi
- 5) Data *Landuse*
- 6) Data kependudukan;
- 7) Data perkembangan ekonomi dan keadaan sosial budaya
- 8) Data Jenis, lokasi dan luas kawasan ;
- 9) Data sosial ekonomi Kawasan waterfront;

4.2.2 Pengumpulan Data Skunder

Pengumpulan data sekunder, yang dilakukan melalui studi pustaka dari berbagai sumber yang berasal dari instansi pemerintah, lembaga formal dan informal dan literatur. Hasil-hasil penelitian dan kajian literatur yang memuat informasi tentang potensi, kapasitas dan luasan, serta lokasi yang sesuai dan memiliki relevansinya dengan Kawasan Water Front City yang sudah dibangun oleh Pemerintah Kota Pontianak.

4.3. Teknik Analisis

Tahap ini merupakan tahap pengolahan data yang sudah diperoleh guna dilakukan analisis dalam memperoleh potensi dan permasalahan pengembangan wilayah perencanaan.

Mengelompokkan data dan informasi menurut kategori aspek kajian seperti data kebijakan, fisik dan penggunaan lahan, sosial kependudukan, perekonomian, tipologi pekerjaan, sosial budaya, rencana tata ruang kota, perekonomian dll.

- Menyortir data-data setiap aspek tersebut agar menjadi sederhana dan tidak duplikasi.
- Mendetailkan desain pengolahan dan kompilasi data dari desain studi awal sehingga tercipta form-form isian berupa tabel-tabel, konsep isian, peta tematik, dll.
- Melakukan pengolahan data berupa penjumlahan, penggalan, pembagian, prosentase dan sebagainya baik bagi data primer maupun sekunder.

Semua data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil kegiatan pengumpulan data dan survei kemudian di kompilasi. Pada dasarnya kegiatan kompilasi data ini dilakukan dengan cara mentabulasi dan sistemasi data-data tersebut dengan menggunakan cara komputerisasi. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya data dan informasi yang telah diperoleh sehingga mudah untuk dianalisis.

4.3.1 Analisa Kondisi fisik Kota Pontianak

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis kuantitatif yaitu overlay. Overlay merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda.

4.3.2 Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tipologi Pekerjaan

Analisi Perekonomian menggunakan teknik analisis Location Quotient (LQ) menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan sektor yang sama pada

daerah yang lebih luas. LQ aktivitas pertanian tanaman bahan makanan menggunakan data luas tanam dan luas panen tahun 2016.

Location Quotient (LQ) merupakan suatu indeks untuk membandingkan pangsa sub wilayah dalam aktivitas tertentu dengan pangsa total aktivitas tersebut dalam total aktivitas wilayah. Secara lebih operasional, *LQ* didefinisikan sebagai rasio persentase dari total aktivitas pada sub wilayah terhadap persentase aktivitas total terhadap wilayah yang diamati. Adapun persamaan dari *LQ* ini adalah:

$$LQ = \frac{X_r/R_r}{X_n/R_n}$$

Keterangan:

X_r : nilai sektor/industri x dalam sub region

X_n : nilai sektor/industri x dalam region

R_r : total nilai sektor/industri x dalam sub region

R_n : total nilai sektor/industri x dalam region

Nilai *LQ* dapat memberikan gambaran apakah daerah yang diteliti telah mengalami keseimbangan atau belum dalam kegiatan tertentu. Secara lebih jelas indikasi berdasarkan *LQ* adalah sebagai berikut:

$LQ > 1$: memberikan arti daerah yang diselidiki memiliki potensi ekspor dalam kegiatan tertentu (memiliki sektor basis)

$LQ < 1$: memberikan arti daerah yang diselidiki memiliki kecenderungan impor dari daerah lain dalam kegiatan tertentu (memiliki sektor non basis)

$LQ = 1$: memberikan arti daerah yang diselidiki telah mencukupi dalam kegiatan tertentu (seimbang)

Untuk mempermudah dalam analisis secara spasial, maka teknik analisis yang akan digunakan adalah *Klassen Typology* untuk mengetahui karakteristik tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah. Sjafrizal (1997); Kuncoro, (1999) menjelaskan bahwa dengan menggunakan alat analisis ini dapat diperoleh empat karakteristik pertumbuhan masing-masing daerah yaitu daerah maju dan bertumbuh cepat (*rapid growth region*), daerah maju tetapi tertekan (*retarded region*), daerah sedang bertumbuh (*growing region*), dan daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*), yaitu (a) low growth, high income, (b) high growth, high income, (c) high growth, low income, (a) low growth, low income. Penyajian secara matrik dari alat analisis Tipologi *Klassen* oleh Sjafrizal (1997) dapat disimak dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi menurut Tipologi *Klassen*

LP IPM (r)	PDRB/kapita (y)	
	(y ₁ > y)	(y ₁ < y)
(r ₁ > r)	Daerah maju dan bertumbuh cepat	Daerah sedang bertumbuh
(r ₁ < r)	Daerah maju tetapi tertekan	Daerah relatif tertinggal

Sumber : Sjafrizal, (1997: 30)

Keterangan:

r₁ = Laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota;

r = Rata-rata laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota;

y₁ = Pendapatan per kapita kabupaten/kota;

y = Rata-rata pendapatan per kapita kabupaten/kota

4.3.3 Analisis Kependudukan

1. **Tujuan**, sebagai subjek pembangunan dalam mengukur hunian yang layak huni, kebutuhan pelayanan fasilitas lingkungan, dan klasifikasi lingkungan.

2. **Komponen analisa;**

- Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk digunakan untuk melihat tingkat kepadatan masing-masing wilayah

- Kepadatan bersih: $\sum \text{pddk} / \text{Luas wilayah terbangun}$
- Kepadatan kotor: $\sum \text{pddk} / \text{Luas total wilayah}$

- Proyeksi jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk

Proyeksi penduduk digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk di MYD dalam keperluan pembangunan sebagai usaha peningkatan kualitas sosial dan ekonomi masyarakat.

1) Perkiraan Bandingan

Merupakan metode paling sederhana, untuk daerah yang memiliki data tidak lengkap/baru tumbuh (baru dibuka) dan membandingkan daerah rencana dengan daerah lain yang dianggap memiliki ciri perkembangan yg sama.

2) Metode Ekstrapolasi

a) Cara Grafik (cara sederhana):

- Tujuan utama bukan ketepatan perkiraan pddk, melainkan utk melihat kecendrungan perkembangan pddk.
- Cara meramal:
 - Jumlah pddk dari tahun lampau sampai tahun terakhir digambarkan dalam susunan koordinat-salib

- Dengan pertimbangan peramal, ditarik garis mengikuti titik-titik yg telah dibuat diatas
- Memperpanjang garis ini untuk memperkirakan jumlah pddk dimasa yg akan datang

b) Ekstrapolasi dengan fungsi matematika

- Metode Linier

Asumsi: menganggap bahwa perkembangan masa lampau sama dengan masa yang akan datang. Artinya, laju pertumbuhan penduduk dianggap tetap. Sehingga hanya dapat digunakan untuk rencana jangka pendek.

$$\text{Rumus: } P_t = P_0 + an$$

Jumlah penduduk proyeksi tahun t

P_0 : Jumlah penduduk tahun awal

a : Rata-rata pertambahan Σ pddk tiap tahun

n : selisih tahun rencana dengan tahun dasar

- Metode Regresi Linier

Metode ini merupakan penghalusan metode linier, karena akan memberikan penyimpangan minimum atas data masa lampau. Artinya asumsi yang digunakan sama dengan metode linier, yaitu perkembangan masa lampau sama dengan masa sekarang (laju pertumbuhan penduduk dianggap tetap)

$$\text{Rumus: } P_t = a + bx$$

$$a = \frac{\Sigma P \Sigma x^2 - \Sigma x \Sigma Px}{N \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

$$b = \frac{N \Sigma Px - \Sigma x \Sigma P}{N \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$



Keterangan:

X = tambahan tahun terhitung dari tahun dasar

P = jumlah penduduk

N = jumlah data penduduk (time series)

- Metode Bunga Berganda (Geometrik)

Teknik ini menganggap perkembangan jumlah penduduk akan bergerak dengan senddirinya.

$$\text{Rumus: } P_t = P_o (1 + r)^{(n)}$$

Keterangan:

r = rata-rata pertumbuhan penduduk

$$r = \frac{\sum \text{penduduk tahun } t - \sum \text{penduduk tahun sebelumnya}}{\sum \text{penduduk tahun sebelumnya}}$$

- Metode Eksponensial

Teknik ini menganggap pertumbuhan penduduk secara terus menerus menunjukkan angka pertumbuhan yang konstan

$$\text{Rumus: } P_t = P_o \times e^{rn}$$

Dimana:

e : bilangan pokok sistem logaritma natural = 2,7182818

4.3.3 Analisis Sosial dan Budaya

Populasi dalam penelitian ini masyarakat yang bermukim di kawasan *Waterfront city* khususnya yang terletak di tepian sungai Kapuas dari alun-alun Kapuas sampai ke Jembatan Kapuas I, dari Masjid Keraton sampai ke

Jembatan Kapuas I dan dan pada tepian sungai Landak dari Masjid Jami Keraton sampai ke dekat surau Hidatushshalihin Kelurahan Tanjung Hilir, yang kemudian ditentukan sampel. Menurut Noor (2012) bahwa penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{\sum X_t}{\sum X_t \alpha^2 + 1}$$

Keterangan :

N = Jumlah sampel

$\sum X_t$ = Jumlah populasi

α = tingkat kesalahan yang dipakai 10% atau 0,1.

Metode yang digunakan untuk pengukuran menggunakan skala likert yang memiliki 5 (lima) jawaban yaitu sebagaimana terlihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Kualifikasi dan Skor Skala Likert

No	Kualifikasi	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2010)

4.3.4 Analisis Strategi

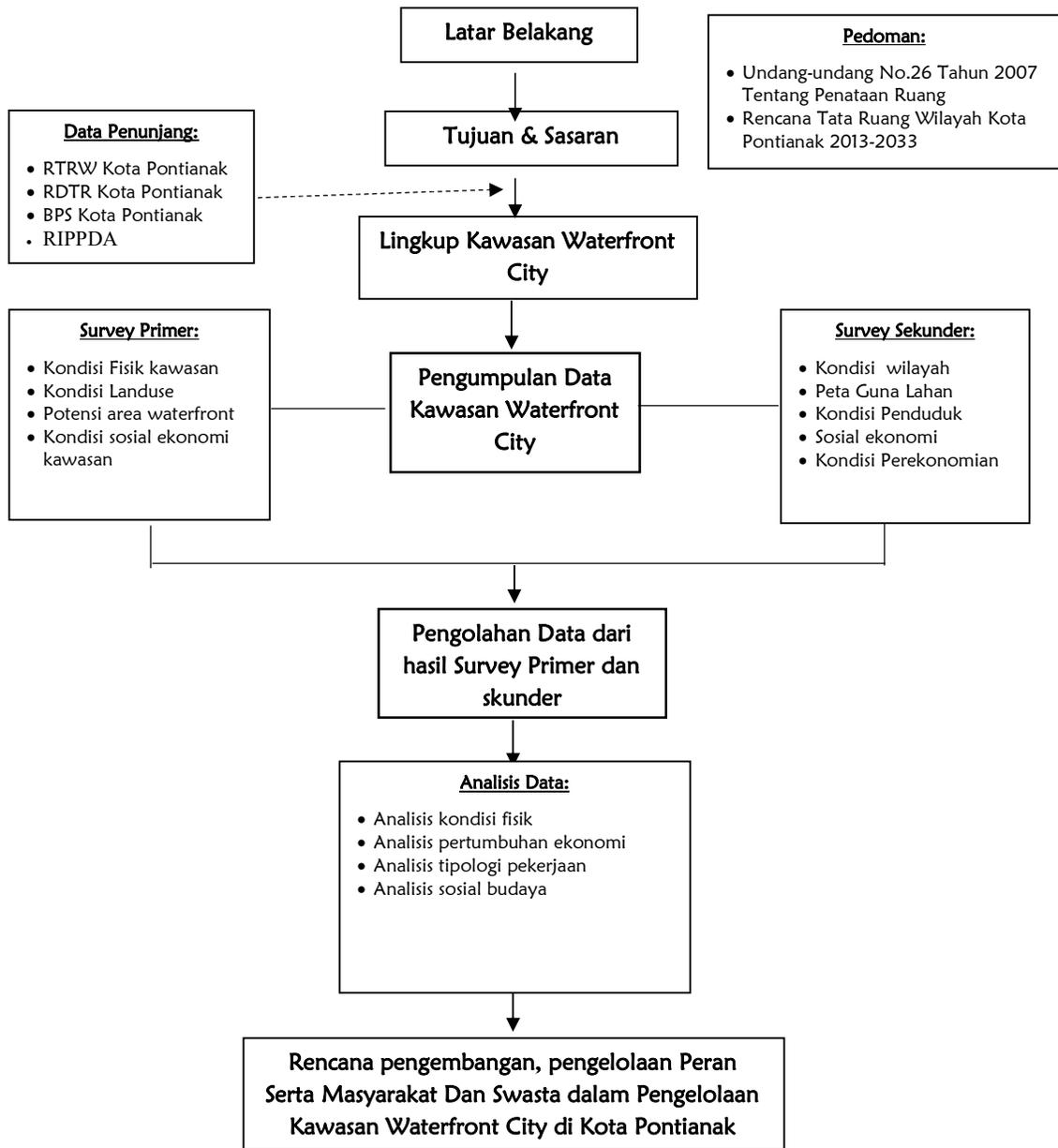
Sedangkan output yang dihasilkan adalah konsep dan strategi Peran Serta Masyarakat Dan Swasta dalam Pengelolaan Kawasan Waterfront City di Kota Pontianak dalam kaitannya dengan Analisa-analisa diatas. Setelah itu dihasilkan konsep dan strategi pemanfaatan kawasan tepi pantai untuk rekreasi yang dapat menunjang waterfront city melalui analisis SWOT

Tabel 3.3. Contoh Matriks SWOT

Faktor Eksternal	Faktor Internal	
	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
Opportunities (Peluang)	Pakai kekuatan untuk Memanfaatkan peluang. Strategi S-O.	Tanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Strategi W-O.
Threats (Tantangan/Hambatan)	Pakai kekuatan untuk menghindari ancaman. Strategi S-T.	Perkecil kelemahan dan hindari ancaman. Strategi W-T.

Sumber: David dalam Salusu, 1996

Gambar 3.1. Kerangka Berpikir Pekerjaan



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI

4.1 Kondisi Fisik Wilayah Kota Pontianak

4.1.1 Keadaan Geografis

Secara astronomis, Kota Pontianak terletak antara 0° 02' 24" Lintang Utara dan 0° 05' 37" Lintang Selatan dan antara 109° 16' 25" Bujur Timur sampai dengan 109° 23' 01" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, Kota Pontianak berada tepat dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga menjadikan Kota Pontianak sebagai salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

Wilayah Kota Pontianak memiliki luas 107,82 km² terbagi atas 6 Kecamatan yang meliputi Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Kota, dan Pontianak Utara. Secara keseluruhan Kota Pontianak berbatasan dengan wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya, yaitu :

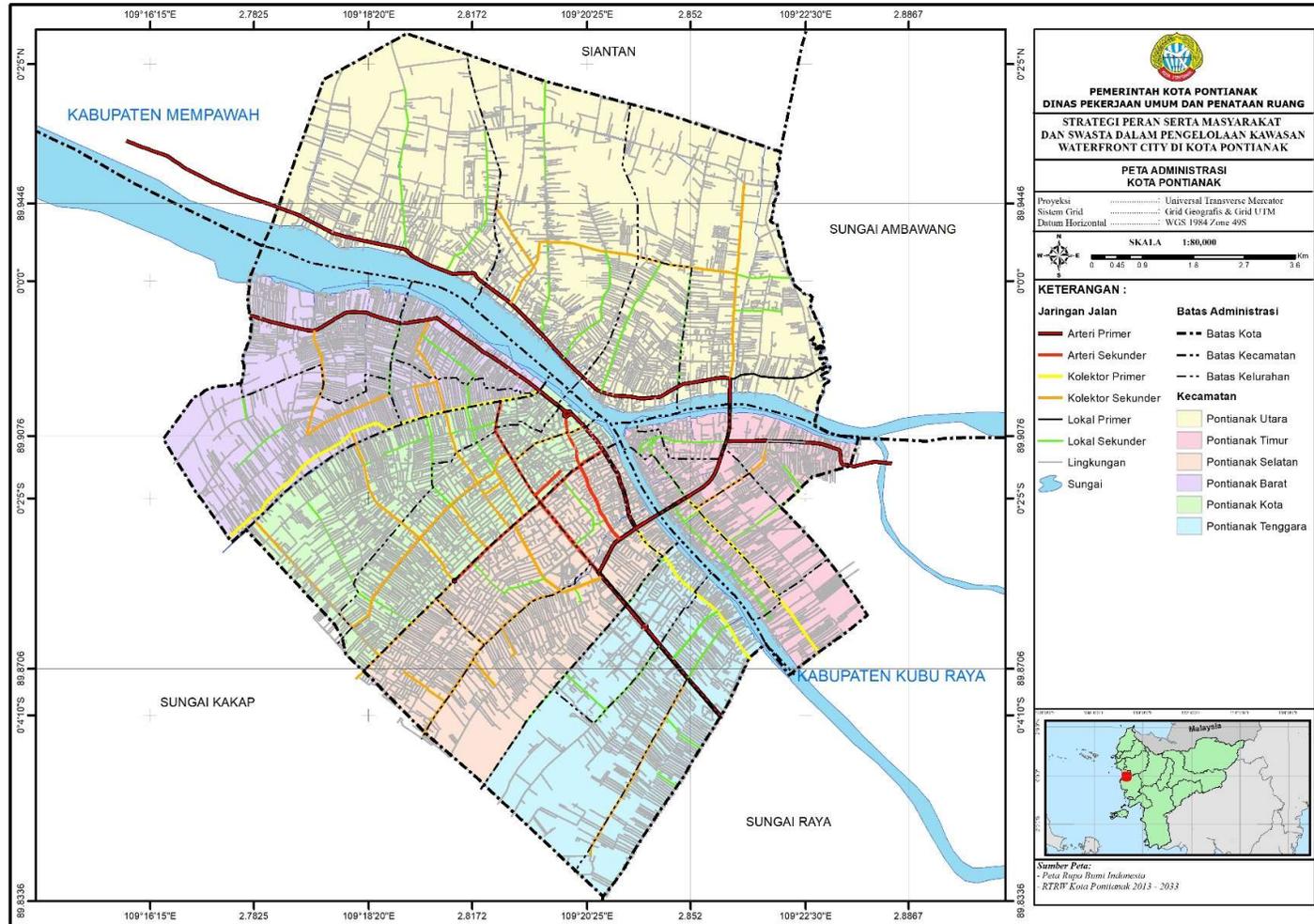
- Bagian Utara : Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah
- Bagian Selatan : Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
- Bagian Barat : Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
- Bagian Timur : Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 4.1 Luas Per Kecamatan di Kota Pontianak

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km²)	Persentase Terhadap Luas Wilayah (%)
Pontianak Selatan	Kota Baru	15,54	13,49
Pontianak Tenggara	Bangka Belitung Barat	14,83	13,75
Pontianak Timur	Tanjung Hulu	8,78	8,14
Pontianak Barat	Sungai Jawi Dalam	16,94	15,71
Pontianak Kota	Sungai Bangkong	15,51	14,39
Pontianak Utara	Siantan Hilir	37,22	34,52
Kota Pontianak		107,82	100

Sumber : Kota Pontianak dalam Angka Tahun 2020

Gambar 4.1. Peta Wilayah Administrasi Kota Pontianak



Sungai Kapuas yang mengalir di tengah kota Pontianak dikenal sebagai sungai terpanjang di Indonesia. Memiliki fungsi ekonomi yang cukup signifikan, demikian pula situs sejarahnya, merupakan situs asal mula budaya Melayu di Pontianak. Selain sebagai jalur transportasi, Sungai Kapuas kini juga menjadi salah satu tempat destinasi wisata bagi masyarakat Kalimantan Barat, khususnya masyarakat yang tinggal di Kota Pontianak. Mereka kini dapat menikmati keindahan Sungai Kapuas sejak dibangunnya Waterfront City tahun 2017. Waterfront City yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Pontianak di Kota Pontianak menjadi tempat wisata alternatif untuk warga setempat.

Proyek ini dikerjakan secara kolaboratif antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Pontianak. Sejak 2016-2019 terdapat 11 lokasi kawasan pemukiman nelayan dan tepi air yang telah digarap Kementerian PUPR. Program ini bertujuan untuk mengembangkan pemukiman pesisir berbasis ekonomi perikanan di berbagai lokasi di Indonesia. Penataan yang dilakukan di kawasan waterfront tidak hanya memperbaiki fisik infrastrukturnya, tetapi juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungannya. Hal itu dimungkinkan karena perencanaan dilakukan bersama antara pemerintah kota dengan masyarakat. Untuk pemanfaatan selanjutnya tinggal bagaimana peran Pemkot untuk pemberdayaan masyarakatnya sehingga dapat mengembangkan potensi kawasan tersebut.

Waterfront City sering dijadikan masyarakat Kota Pontianak sebagai tempat untuk berolahraga seperti jogging atau jalan santai. Selain berolahraga, tempat ini juga cocok menjadi tempat rekreasi untuk keluarga karena tersedia aneka jenis permainan untuk anak-anak yang bisa disewa seperti becak mini,

skuter listrik, mobil remote, dan motor listrik. Selain itu, pengunjung yang membawa anak kecil juga dapat mengasah kreativitas anaknya dengan mewarnai lukisan gambar yang telah tersedia oleh pedagang setempat.



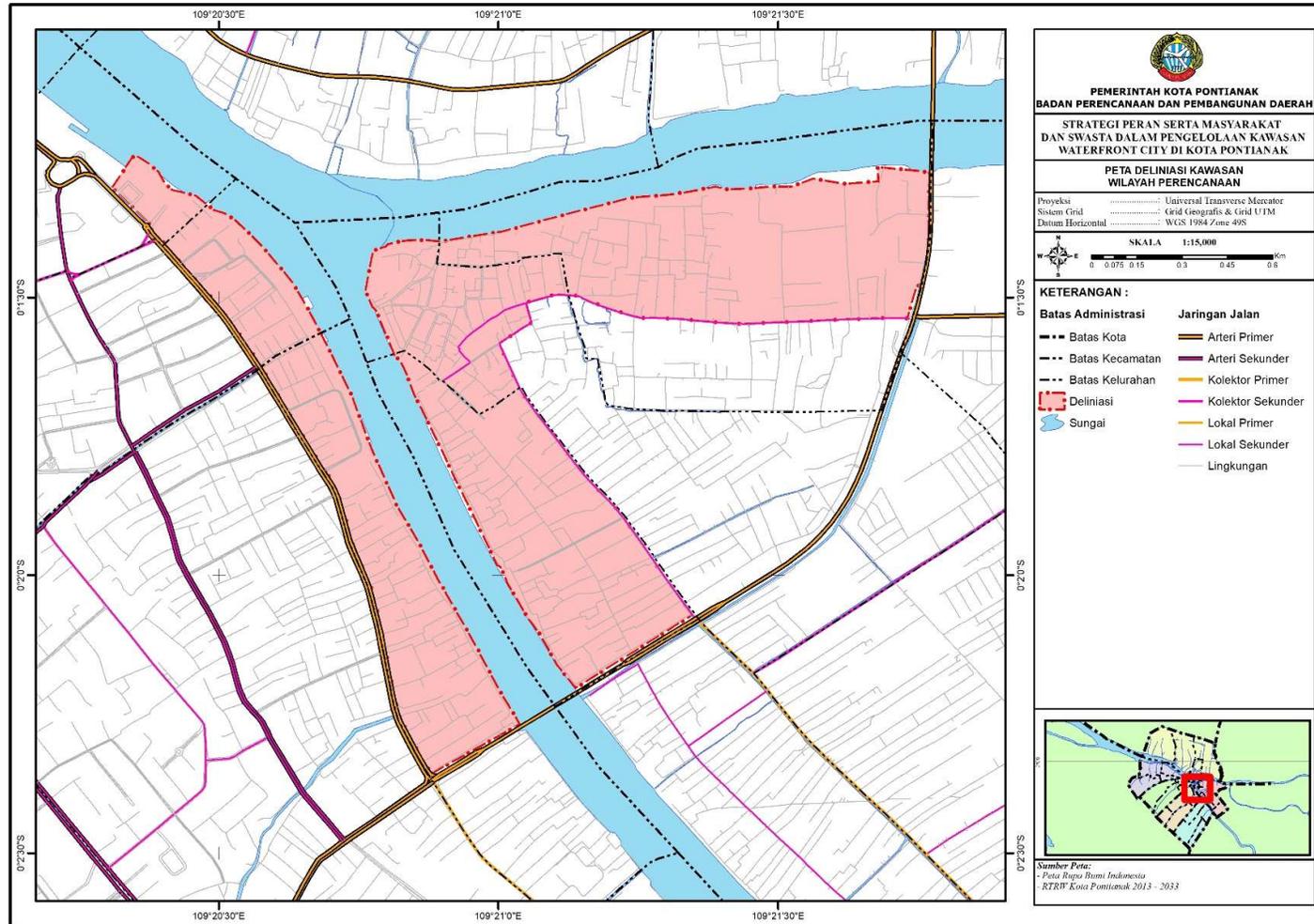
Gambar 4.2. Gerbang Selamat Datang di Kawasan Waterfront City

Sumber : Dokumentasi Lapangan

Waterfront City di Kota Pontianak juga sering kali dijadikan sebagai tempat nongkrong bersama teman, sahabat dan pacar karena telah disediakan tempat duduk dan taman mini di sepanjang jalan tempat ini. Pada saat sore menjelang malam, para penjual makanan (berat dan ringan) dan minuman pun telah menjajahkan dagangannya sehingga memang cocok untuk para pengunjung yang ingin makan malam disini sambil menikmati indahny Sungai Kapuas.

Konsep bangunan yang bagus dan unik ditambah panorama sungai yang indah sering kali menjadikan Waterfront City sebagai spot swafoto untuk para pengunjung. Tempat ini juga menyediakan kapal wisata bagi para pengunjung yang ingin berkeliling secara langsung sambil menikmati keindahan Sungai Kapuas. Fasilitas yang disediakan oleh Waterfront City cukup lengkap, mulai dari lampu bertenaga surya untuk penerangan di malam hari, tempat duduk, mushola, toilet umum, satpam, serta lahan parkir yang cukup luas.

Gambar 4.3. Peta Deliniasi Kawasan Wilayah Perencanaan



4.1.2 Kondisi Penduduk Kota Pontianak

Berdasarkan data jumlah penduduk Kota Pontianak pada tahun 2019 adalah 646.661 jiwa. Penduduk yang berstatus Kepala Keluarga (KK) berjumlah 186.699 dan jumlah wajib KTP di Kota Pontianak sebanyak 478.661 jiwa yang terdiri dari penduduk berumur diatas 17 tahun dan penduduk yang telah menikah. Berikut jumlah penduduk Kota Pontianak Tahun 2019 berdasarkan Kecamatan.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Rasio Tahun 2019

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan		
Pontianak Selatan	48.191	49.011	97.202	98,33
Pontianak Tenggara	25.473	26.853	52.326	94,86
Pontianak Timur	48.101	47.928	96.029	100,36
Pontianak Barat	71.418	72.642	143.060	99,69
Pontianak Kota	63.226	64.474	127.700	98,06
Pontianak Utara	65.847	64.497	130.344	102,09
2019	322.256	324.405	646.661	99,34
2018	318.112	319.611	637.723	99,53
2017	312.904	314.117	627.021	99,61
2016	308.596	309.792	618.388	99,61
2015	302.711	304.727	607.438	99,34

Sumber : Kota Pontianak Dalam Angka 2020

Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Pontianak Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 143.060 jiwa yang terdiri dari 71.418 penduduk laki-laki dan 72.642 penduduk perempuan. Sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Pontianak Tenggara dengan jumlah penduduk sebanyak 52326 jiwa yang terdiri dari 25473 penduduk laki-laki dan 26853 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin

Kota Pontianak untuk jumlah laki-laki di Kota Pontianak lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	28.848	27.645	56.493
2	05-9	27.972	26.808	54.780
3	10-14	26.157	25.353	51.510
4	15-19	28.935	30.478	59.413
5	20-24	31.515	32.454	63.969
6	25-29	27.410	27.805	55.215
7	30-34	25.279	25.611	50.890
8	35-39	24.608	25.715	50.323
9	40-44	23.600	23.136	46.736
10	45-49	20.823	20.036	40.859
11	50-54	17.062	16.726	33.788
12	55-59	14.063	14.369	28.432
13	60-64	10.755	10.618	21.373
14	65-69	7.096	7.287	14.383
15	70-74	4.458	5.124	9.582
16	75+	3.675	5.240	8.915
	2019	322.256	324.405	646.661
	2018	318.112	319.611	637.723
	2017	312.904	314.117	627.021
	2016	308.596	309.792	618.388
	2015	302.711	304.727	607.438

Sumber : Kota Pontianak Dalam Angka 2020

Penduduk usia produktif adalah penduduk yang melaksanakan kegiatan produksi dan segi ekonomi, dimana segala kebutuhan ditanggung mereka sendiri. Sedangkan penduduk usia tidak produktif adalah penduduk yang belum bisa bekerja untuk dapat mencukupi kebutuhan sendiri dan penduduk yang dianggap tidak mampu bekerja. Batasan penduduk usia tidak produktif

adalah 0-14 tahun dan 75+, meskipun pada kenyataannya orang yang telah berusia 65 tahun atau lebih masih banyak yang mampu bekerja termasuk anak-anak yang berumur < 15 tahun, banyak yang sudah mencari nafkah dari jumlah penduduk usia produktif dan tidak produktif bisa diketahui angka beban tanggungan yaitu angka yang menunjukkan banyak penduduk pada usia tidak produktif (0-14 dan 55+) yang harus ditanggung oleh setiap penduduk usia produktif (15-54 tahun).

Jumlah penduduk laki-laki 322.256 jiwa dan perempuan 324.405 jiwa. Berdasarkan komposisi penduduk menurut kelompok umur maka Kota Pontianak didominasi dengan jumlah penduduk menurut umur 20-24 sebesar 31.515 jiwa laki-laki dan perempuan sebesar 32.454 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil menurut kelompok umur terdapat pada kelompok umur 75+ sebesar 8.915 jiwa.

Tabel 4.4 Kepadatan Penduduk (jiwa/km²) di Kota Pontianak

Tahun 2019

No.	Kecamatan	Luas		Penduduk (jiwa)		Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
		Km ²	%	Jumlah	%	
1	Pontianak Selatan	15,54	13,49	97.202	15,03	6.420
2	Pontianak Tenggara	14,83	13,75	52.326	8,09	3.680
3	Pontiana Timur	8,78	8,14	96.029	14,85	10.937
4	Pontianak Barat	16,94	15,71	143.060	22,12	8.686
5	Pontianak Kota	15,51	14,39	127.700	19,75	7.991
6	Pontianak Utara	37,22	34,52	130.344	20,16	3.502
Kota Pontianak		107,82	100	646.661	100	5.998

Sumber : Kota Pontianak Dalam Angka 2020

Penduduk dalam perkembangannya mempunyai kebiasaan hidup berkumpul dan berkonsentrasi membentuk paguyuban di mulai dari RT, RW, Kelurahan

dan seterusnya, sebagai wujud makhluk sosial yang paling membutuhkan. Distribusi penduduk dan tingkat konsentrasi kepadatan penduduk menjadi penting untuk diketahui, agar dapat pula diketahui tingkat hierarki permukimannya berdasarkan tingkat kepadatannya. Sedangkan distribusi kepadatan digunakan untuk mengetahui tingkat penyebaran penduduk yang terjadi di Kota Pontianak, berdasarkan luasan wilayah dan luasan penduduk.

4.1.3 Kota Baru Pontianak

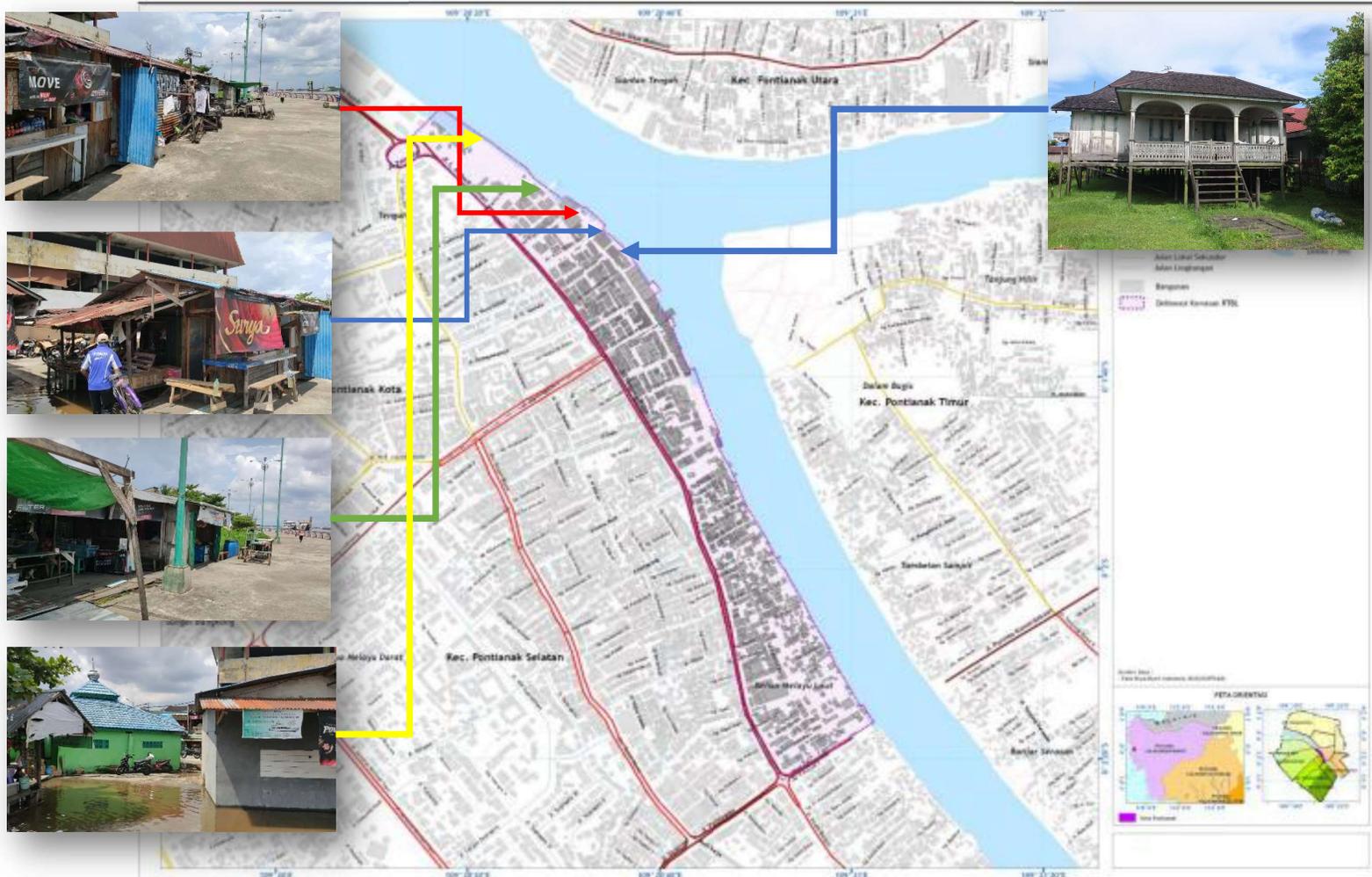
Kawasan Kota Baru Pontianak merupakan kawasan terletak di pusat kota, berkembang sejak fase pertama pembentukan Kota Pontianak. Kawasan ini berperan cukup signifikan dalam penciptaan wajah Kota Pontianak sebagai *water front city*.

Kota Baru Pontianak terletak di delta Sungai Kapuas. Wilayahnya terdiri dari 10 kelurahan yang terdiri dari kelurahan: Tanjung Hilir, Dalam Bugis, Tambelan Sampit, Benua Melayu Laut, Benua Melayu Darat, Tengah, Mariana, Darat Sekip, Siantan Hulu, Siantan Tengah.



Gambar 4.4 Kawasan Permukiman Kota Baru Pontianak



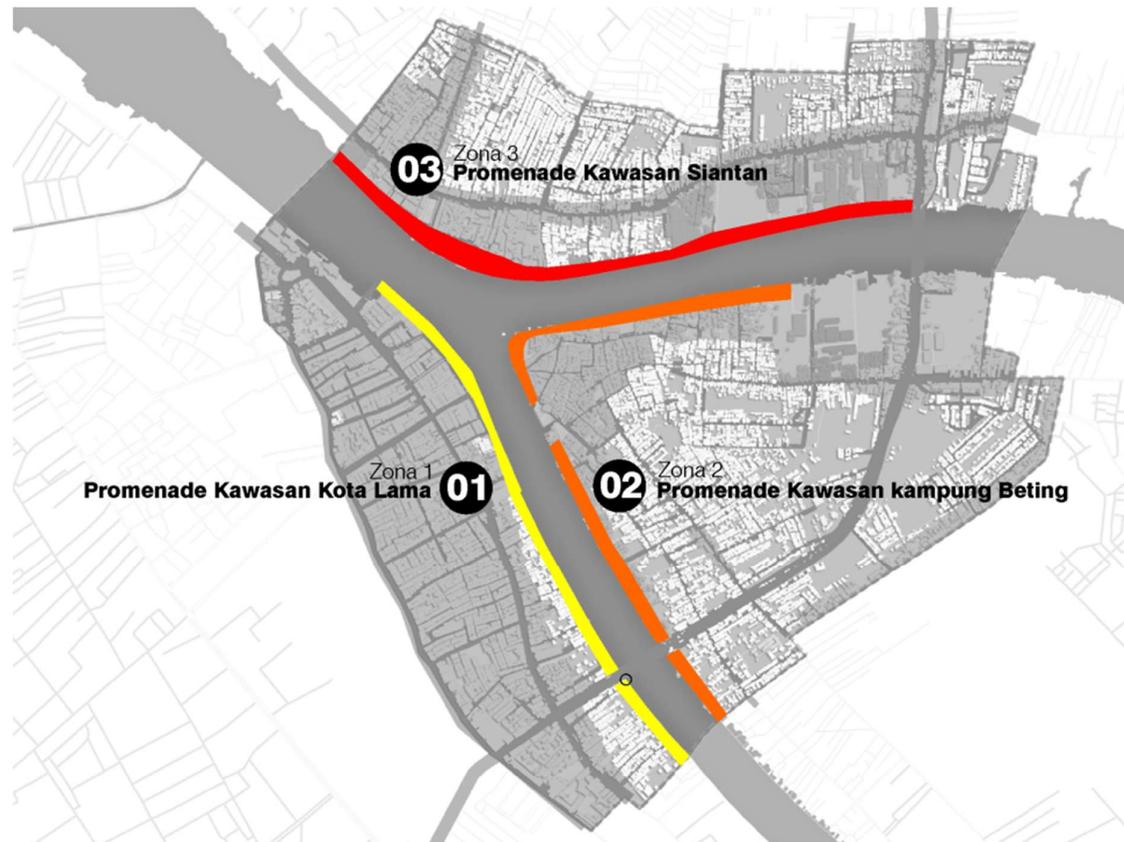


Gambar 4.5. Kawasan Waterfront City Kota Pontianak





Gambar 4.6. Gambaran Umum Deliniasi Kawasan Permukiman Kota Baru



Gambar 4.7. Gambaran Umum Fungsi Strategis Kota Baru



Gambar 4.8. Tipologi Promenade

4.2 Kondisi Kawasan Waterfront City Kota Pontianak

4.2.1 Kondisi Tata Bangunan

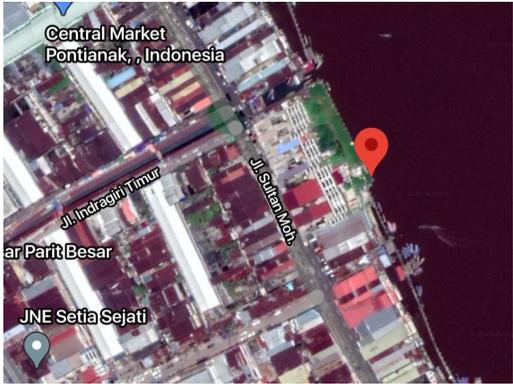
Berdasarkan hasil survey kondisi eksisting yang telah dilakukan di sepanjang kawasan Waterfront City terdapat bangunan – bangunan di sepanjang Waterfront City bangunan tersebut meliputi rumah, ruko, tanah kosong, sarana peribadatan, dermaga pelabuhan, cafe, warung, pertokoan serta permukiman masyarakat. Kondisi ini membuat tata bangunan di sepanjang Waterfront City memiliki pola yang tidak beraturan, dimana pola tata bangunan khususnya permukiman masyarakat sangat dekat dengan kawasan Waterfront City lalu terdapat bangunan yang sudah mendekati hampir memasuki daerah sempadan sungai. Adapun beberapa foto kondisi tata bangunan di sepanjang kawasan Waterfront City adalah sebagai berikut.

A. Kondisi Tata Bangunan Kawasan Waterfront City I

Tabel 4.5. Kondisi Tata Bangunan Kawasan Waterfront City I

No	Foto	Keterangan Lokasi
1		

No	Foto	Keterangan Lokasi
2		
3		
4		

No	Foto	Keterangan Lokasi
5		
6		
7		

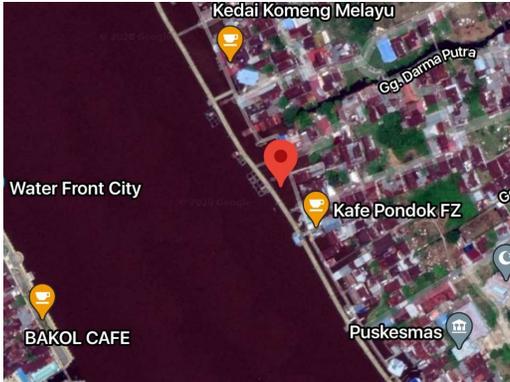
No	Foto	Keterangan Lokasi
8		
9		
10		

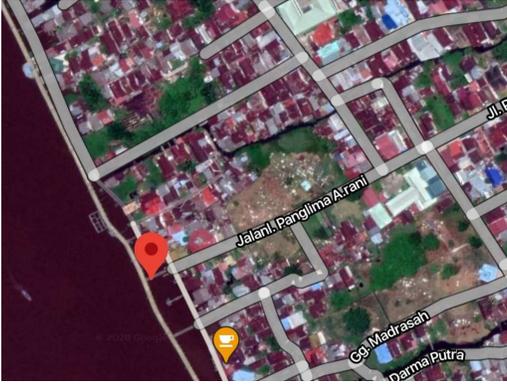
No	Foto	Keterangan Lokasi
11		
12		
13		

No	Foto	Keterangan Lokasi
14		
15		

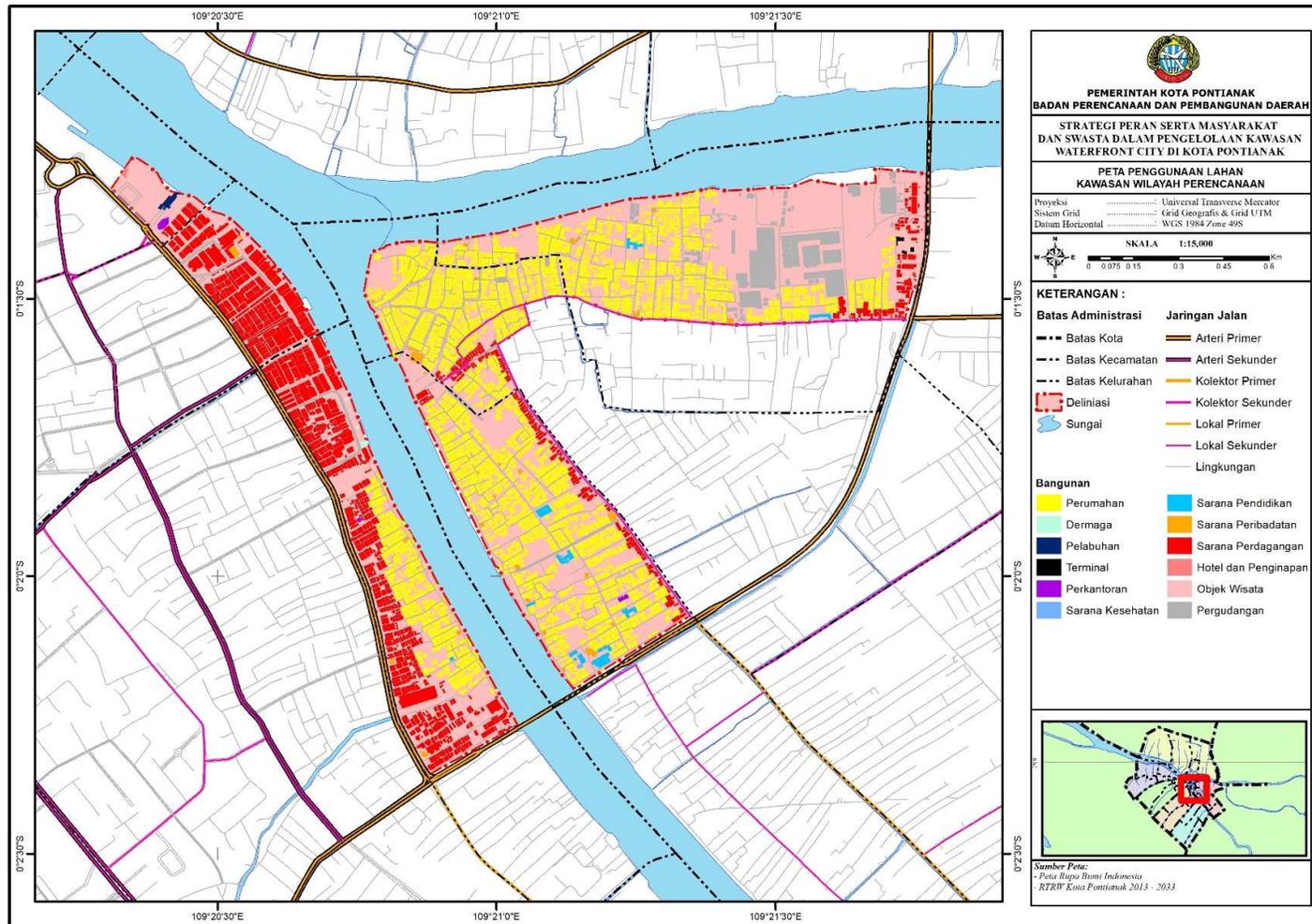
B. Kondisi Tata Bangunan Kawasan Waterfront City II

Tabel 4.6. Kondisi Tata Bangunan Kawasan Waterfront City II

No	Foto	Keterangan Lokasi
1		
2		
3		

No	Foto	Keterangan Lokasi
4		
5		
6		

No	Foto	Keterangan Lokasi
7		
8		



Gambar 4.9. Peta Penggunaan Lahan Kawasan Wilayah Perencanaan



4.2.2 Kondisi Pertokoan, Cafe, Warung dan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pada kawasan Waterfront City untuk kondisi pertokoan, cafe warung, dan pedagang - pedagang kaki lima (PKL) yang dominan pada kawasan ini mengingat kawasan ini sangat ramai dalam segi perdagangan jasa di sepanjang kawasan Waterfront City dari berjualan makanan, minuman dan lain lain. Tidak hanya itu warung dan cafe menjadi andalan untuk bersantai dan berkunjung pada kawasan ini. Adapun kondisi pertokoan, cafe warung, dan pedagang - pedagang kaki lima (PKL) yang ada pada kawasan Waterfront City. Berikut ini beberapa contoh pertokoan, warung, cafe dan PKL yang ada di sepanjang kawasan dapat di lihat pada tabel gambar sebagai berikut.

Tabel 4.7. Kondisi Pertokoan, Cafe, Warung dan Pedagang Kaki Lima (PKL)

No	Foto
1	

No	Foto
2	
3	
4	

4.2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang Kawasan Waterfront City

4.2.3.1 Prasarana Penunjang

A. Jaringan Jalan

Jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarki. Sistem jaringan jalan adalah prasarana yang sangat penting untuk menunjang suatu wilayah. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, ketersediaan jaringan jalan pada kawasan Waterfront City sudah memiliki jaringan jalan namun jalan pada kawasan sekitar waterfront city yang baru di bangun masih ada jalan yang belum terhubung satu dengan lainnya. Kondisi jalan sudah menggunakan perkerasan semen. Dapat dilihat gambar kondisi jaringan jalan di sekitar sepanjang kawasan Waterfront City.



Gambar 4.10. Jaringan Jalan perkerasan semen

Sumber : Dokumentasi Lapangan



Gambar 4.11. Jaringan Jalan Pekarasan Kayu dan Semen

Sumber : Dokumentasi Lapangan

Namun terdapat kendala yang masih ditemukan untuk jaringan jalan di sepanjang kawasan Waterfront City yaitu terdapat jalan yang masih sempit dan terputus.

B. Jaringan Listrik dan Telekomunikasi

Pada kawasan Waterfront City untuk ketersediaan jaringan listrik digunakan untuk lampu jalan dengan kapasitas seperlunya. Secara keseluruhan untuk wilayah kawasan sudah mempunyai jaringan listrik. Sedangkan untuk jaringan telekomunikasi di kawasan Waterfront City sudah tersedia yang memudahkan warga untuk berkomunikasi dan internet. Dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 4.12. Kondisi Jaringan Listrik

Sumber : Dokumentasi Lapangan

C. Jaringan Sumber Air Bersih

Untuk ketersediaan jaringan sumber air bersih di kawasan Waterfront City sudah menggunakan sumber air dari PDAM dan juga menggunakan sumber air parit itu sendiri. Dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 4.13. Kondisi Sumber Air Bersih

Sumber : Dokumentasi Lapangan

D. Persampahan

Untuk persampahan yang ada di kawasan Waterfront City sudah memiliki tempat pembuangan sampah yang terletak di sepanjang kawasan Waterfront City sungai namun masih ada sampah yang masih berserakan di kawasan sekitar sungai yang mengambang di atas permukaan sungai sehingga

mencemari lingkungan dan air sungai tersebut, dapat di lihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 4.14 Tempat Sampah dan Kondisi Sampah di Kawasan Waterfront City

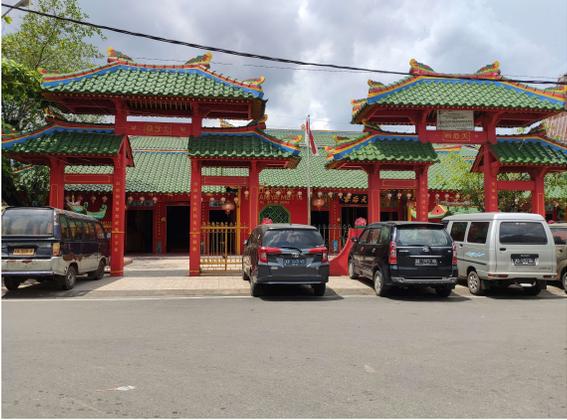
Sumber : Dokumentasi Lapangan

4.3.2. Sarana Penunjang

A. Sarana Peribadatan

Untuk sarana peribadatan merupakan fasilitas yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Sarana peribadatan merupakan sarana yang perlu disediakan. Pada kawasan Waterfront City terdapat sarana peribadatan paling dominan adalah masjid dan surau karena sebagian besar masyarakat di kawasan ini mayoritas beragama Islam, berikut jumlah sarana peribadatan yang terdapat di sepanjang kawasan Waterfront City dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.8. Sarana Peribadatan di Sepanjang Kawasan Waterfront City

No	Nama	Gambar
1	Vihara Bodhisatva Karaniya Metta	
2	Surau	
3	Surau Khairus Sa'adah	

No	Nama	Gambar
4	Surau Al Fattah	
5	Surau Ihwanul Muslimin	
6	Surau Babus Sa'adah	
7	Masjid Nurul Hidayah	

No	Nama	Gambar
8	Masjid Nurul Huda	 A photograph of Masjid Nurul Huda, a white mosque with a large blue dome and two minarets, situated on a waterfront area.
9	Surau Nahdatusy Syakirin	 A photograph of Surau Nahdatusy Syakirin, a small green and white structure with a blue roof, located on a wooden pier over water.
10	Surau As-Syahrudin	 A photograph of Surau As-Syahrudin, a blue and white structure with a green roof, situated on a wooden pier over water.

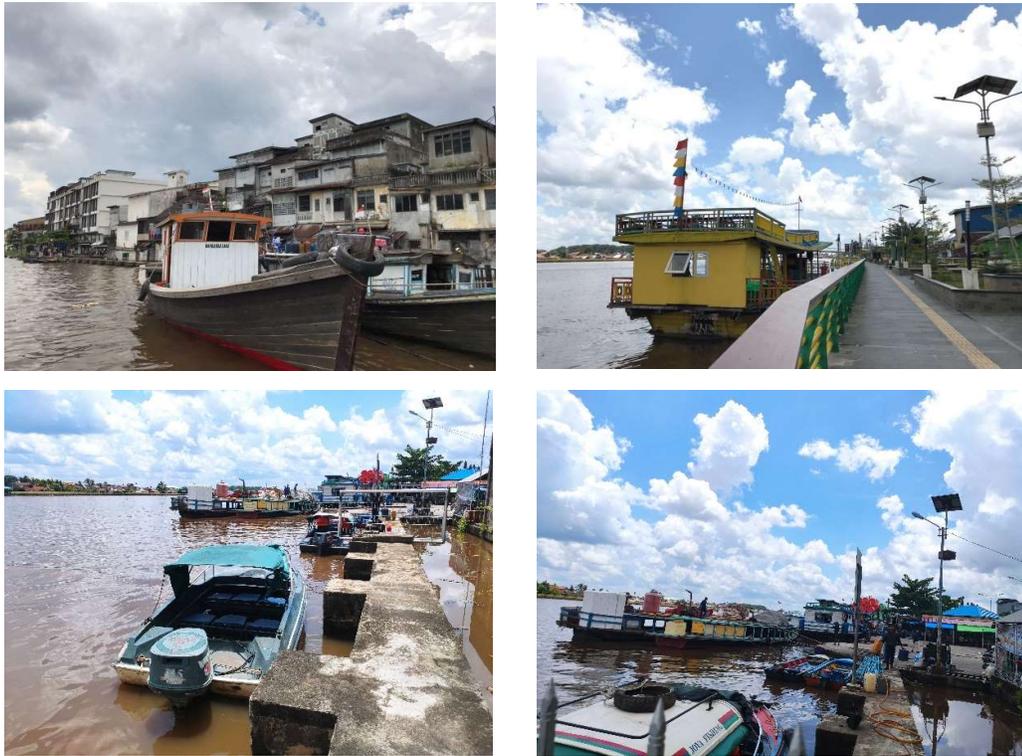
No	Nama	Gambar
11	Surau Husnol Khatimah	
12	Surau	
13	Surau	

No	Nama	Gambar
14	Surau Hidayatul Mushallin	
15	Masjid Jami'	

B. Fasilitas Transportasi Air

Untuk fasilitas transportasi yang ada di kawasan Waterfront City terdapat sampan dan kapal yang masih beroperasi di sepanjang kawasan Waterfront City dan masih di dimanfaatkan sebagai penyeberang sungai oleh masyarakat, mengangkut barang – barang menuju pasar serta akses pulang pergi bagi masyarakat yang tinggal di daerah seberang. Selain itu, terdapat kapal atau biasa disebut dengan "Galaherang" oleh orang setempat sebagai fasilitas

pariwisata untuk menelusuri sungai kapuas Dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 4.15. Kondisi Tranportasi Air di Kawasan Waterfront City

Sumber : Dokumentasi Lapangan

C. Pos Keamanan

Keberadaan pos keamanan sangat penting dalam sarana penunjang pariwisata sebagai tempat untuk mencari informasi bagi wisata yang ingin kawasan Waterfront City. Pada kawasan Waterfront City terdapat pos keamanan yang terdapat pada area kawasan tersebut, pos keamanan ini berfungsi sebagai fasilitas penunjang dalam menjaga aktivitas yang ada di sekitar kawasan terutama pada malam hari karena untuk meminimalisir kejahatan yang ada di sekitar kawasan.



Gambar 4.16. Kondisi Pos Keamanan di Kawasan Waterfront City

Sumber : Dokumentasi Lapangan

4.3 Kondisi Pariwisata Kota Pontianak

Permukiman penduduk berdiri di atas lahan pasang surut air Sungai Kapuas, kepadatan bangunan permukiman sangat tinggi dengan sirkulasi jaringan jalan berupa jalan inspeksi selebar 1,5 m, selain itu kawasan permukiman mencirikan bangunan budaya melayu, namun lingkungan kumuh.

Daya Tarik Obyek Wisata di Kota Pontianak terletak pada bentuk atau pola yang beragam, sehingga dapat menjadi salah satu faktor penarik (pull faktor) bagi kunjungan pariwisata. Pull faktor lainnya adalah keunikan serta ciri khas obyek wisata yang disebabkan adanya faktor geografis yang tidak dimiliki oleh kota-kota lainnya di dunia yaitu dilalui oleh Garis Khatulistiwa. Obyek Kota Pontianak dapat di bagi menjadi tiga jenis :

1. Wisata Alam : obyek wisata alam di Kota Pontianak jumlahnya relative terbatas, mengingat potensi wisata yang ditemui lebih terfokus pada keindahan alam Sungai Kapuas
2. Wisata Budaya : obyek wisata budaya terdiri dari obyek peninggalan sejarah dan pementasan kesenian tradisional
3. Wisata Minat Khusus: adalah atraksi wisata spesifik yang menjadi daya tarik wisatawan seperti wisata kuliner dan lain-lain.

Adapun lahan peruntukan pariwisata di Kota Pontianak seluas 67,8 hektar, yaitu meliputi pariwisata budaya sebagai berikut :

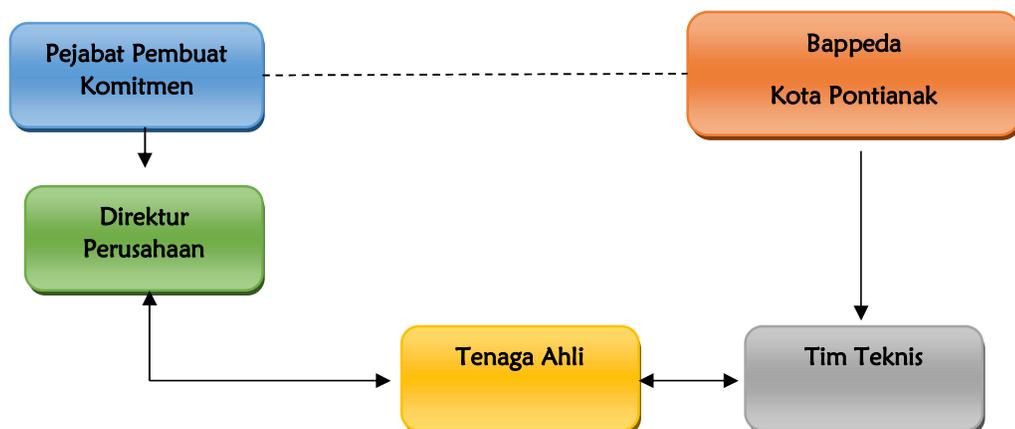
- a. Kawasan pariwisata Tugu Khatulistiwa di Kelurahan Batu Layang
- b. Kecamatan Pontianak Utara
- c. Kawasan pariwisata Keraton Kadriyah di Kelurahan Dalam Bugis
- d. Kecamatan Pontianak Timur
- e. Kawasan pariwisata Kampung Beting di Kelurahan Tanjung Hilir
- f. Kecamatan Pontianak Timur
- g. Kawasan pariwisata Makam Batu Layang di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara
- h. Kawasan pariwisata Museum dan Taman Budaya di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan
- i. Kawasan pariwisata Cagar Budaya Rumah Betang di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan
- j. Kawasan pariwisata Kampung Budaya di Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota dan,
- k. Kawasan pariwisata Cagar Budaya Kelenteng Tua di Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota.

BAB V ORGANISASI DAN RENCANA KERJA

5.1. Struktur Pelaksana Pekerjaan

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak yang dipihak-ketigakan dengan sistem kontraktual kepada konsultan. Dalam pelaksanaannya, Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak berkomunikasi dengan pihak konsultan melalui pejabat pembuat komitmen, serta tim teknis daerah. Sehingga hal-hal yang bersifat administratif maupun teknis dapat terselenggara dengan baik. Organisasi pekerjaan diuraikan pada gambar berikut.

Gambar 5.1. Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan



Sistem pengorganisasian yang digunakan adalah koordinasi ini dan staff (*line and staff organization*). Sistem ini pada dasarnya merupakan

kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Kombinasi ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kebaikan-kebaikannya dan meniadakan keburukannya. Asas perintah tetap dipertahankan dan pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dari pucuk pimpinan pada pimpinan di bawahnya.

Dalam membantu kelancaran tugas pimpinan, *team leader* mendapat bantuan dari para staff (terdiri dari para tenaga ahli). Tugas para staff (tenaga ahli) adalah untuk memberikan bantuan, pemikiran saran-saran, data, informasi dan pelayanan kepada team leader sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan keputusan dan kebijaksanaannya. Untuk menjalankan tugasnya, beberapa tenaga ahli dibantu oleh asisten tenaga ahli, sedangkan keperluan administratif, baik team leader maupun tenaga ahli dapat dibantu oleh tenaga administratif.

Ketua Tim bertugas mengkoordinasikan, dan memimpin tim selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan memiliki kualitas yang baik. Ketua Tim akan bekerja secara penuh mulai ditandatangani kontrak sampai berakhirnya kegiatan sesuai dengan kontrak kegiatan.

5.2. Tugas Tim dan Tenaga Ahli

Dalam rangka kegiatan Penyusunan Strategi Peran Serta Masyarakat Dan Swasta dalam Pengelolaan Kawasan *Waterfront City* di Kota Pontianak ini diperlukan seorang *team leader* dan tenaga ahli dari bidang disiplin ilmu yang terkait. Berikut ini susunan tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan :

Tenaga pelaksana yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini terdiri dari Tenaga Ahli (Professional), dan Tenaga Pendukung (Supporting).

- Tenaga Ahli (Professional)

Tenaga Ahli yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah:

1. Ahli Sosial (Team Leader)

Ketua tim disyaratkan seorang Ahli Sosial dengan latar belakang pendidikan minimal S1 dari Sosial. Mempunyai pengalaman profesional dalam pengembangan wilayah dan kota minimal 2 tahun.

2. Ahli Perencana Wilayah dan Kota

Ahli Kehutanan sebanyak 1 (satu) orang dan minimal pendidikan adalah Sarjana Perencana Wilayah dan Kota (S 1) yang berpengalaman dalam bidang planologi dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun.

- Tenaga Pembantu/Supporting Staf yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :

1. Drafter/Surveyor, sebanyak 2 (dua) orang dengan kualifikasi pendidikan minimal D III semua jurusan atau yang sederajat, dan berpengalaman dalam melakukan survey, pengumpulan data dan pemetaan.

2. Operator Komputer/CAD, sebanyak 1 (satu) orang, dengan kualifikasi pendidikan minimal SMK/SMA atau yang sederajat dan berpengalaman dalam pengoperasian komputer.

5.3. Pelaporan

Laporan Rencana Penyusunan Konsep dan Strategi Peran Serta Masyarakat Dan Swasta dalam Pengelolaan Kawasan *Waterfront City* di Kota Pontianak ini dibagi kedalam 2 (dua) jenis laporan yaitu :



A. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan berisi tentang :

- 1) Orientasi awal studi perencanaan kawasan yang pernah dilaksanakan dan dokumen yang ada serta penyiapan logical frame work/alur pikir rencana pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Metodologi pelaksanaan pekerjaan analisis kajian termasuk identifikasi struktur basis data dan informasi dalam mendukung analisis.
- 3) Rencana jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan kajian pengembangan kelembagaan pengelolaan kawasan pada wilayah studi termasuk nama dan jadwal penugasan tenaga ahli dan staf pendukung.

Laporan pendahuluan harus diserahkan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan sebanyak 5 (lima) eksemplar dan dilakukan pembahasan laporan tersebut untuk dapat diterima oleh Tim Teknis.

B. Laporan Akhir

Laporan Akhir merupakan laporan rencana yang dikerjakan oleh pihak kegiatan, berisi tentang :

- 1) Penyempurnaan dari laporan akhir setelah pembahasan dan mendapat masukan dari pihak pemberi tugas termasuk Tim Teknis.
- 2) Secara substantif bersifat komprehensif dan berisikan semua output yang telah dihasilkan pada laporan-laporan sebelumnya.

C. Laporan Soft Copy

Compact Disc (CD) dan flasdisk yang berisi Laporan Pendahuluan, dan Laporan Akhir yang dimasukkan dalam CD (*Compact Disc*).

D. Album Peta

Kumpulan dari Peta-Peta Dasar/Tematik, Peta Analisa dan Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Waterfront City Kota Pontianak.

E. Laporan Eksecutive Summary

Ringkasan Eksekutif (*Executive summary*), yang berisi ringkasan materi dan konsep secara kumulatif yang telah dihasilkan pada laporan akhir. Laporan ini diserahkan bersamaan dengan laporan akhir sebanyak 5 eksemplar.

Laporan akhir dibuat sebanyak 5 (lima) eksemplar laporan dan diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah SPMK.

5.4. Rencana Kerja

Penyusunan Penyusunan Konsep dan Strategi Peran Serta Masyarakat Dan Swasta dalam Pengelolaan Kawasan *Waterfront City* di Kota Pontianak dilaksanakan selama 60 (sembilan puluh) hari kalender atau 2 (dua) bulan, dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

Tabel 5.1 Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan							
		Bulan 1				Bulan 2			
		Minggu ke-				Minggu ke-			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan data awal dan persiapan pekerjaan								
2	Penyusunan Laporan Pendahuluan								
3	Kegiatan Survei dan pengumpulan data / informasi								
4	Kegiatan kompilasi data dan analisa data								
5	Penyusunan Laporan Draft Akhir								
6	Penyempurnaan Laporan Draft Akhir menjadi Laporan Akhir								

Sumber : Hasil Penyusunan, 2020